

**PROSEDUR DAN PENGAWASAN PEMBERIAN KREDIT
UNTUK MEMPERTAHANKAN LIKUIDITAS PERUSAHAAN
PADA PT. BPR BATU ARTOREJO TAHUN 2012-2015**

SKRIPSI



Oleh :

**NUR HIKMAH
NIM: 12510039**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**PROSEDUR DAN PENGAWASAN PEMBERIAN KREDIT
UNTUK MEMPERTAHANKAN LIKUIDITAS PERUSAHAAN
PADA PT. BPR BATU ARTOREJO TAHUN 2012-2015**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

NUR HIKMAH
NIM: 12510039

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

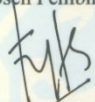
**PROSEDUR DAN PENGAWASAN PEMBERIAN KREDIT
UNTUK MEMPERTAHANKAN LIKUIDITAS PERUSAHAAN
PADA PT. BPR BATU ARTOREJO TAHUN 2012-2015**

SKRIPSI

Oleh:

NUR HIKMAH
NIM: 12510039

Telah Disetujui, 28 Desember 2016
Dosen Pembimbing,



Fitriyah, S.Sos., MM
NIP. 19760924 200801 2 012

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Dr. H. Mishbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSEDUR DAN PENGAWASAN PEMBERIAN KREDIT
UNTUK MEMPERTAHANKAN LIKUIDITAS PERUSAHAAN
PADA PT. BPR BATU ARTOREJO TAHUN 2012-2015**

SKRIPSI

Oleh:

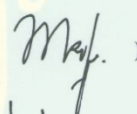
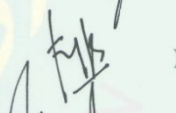
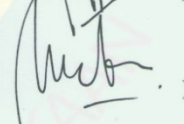
NUR HIKMAH

NIM: 12510039

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 05 Januari 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Ketua Penguji
<u>Maretha Ika Prajawati, SE., MM</u>
NIP. 19890327 20160801 2 046 | : | () |
| 2. Sekretaris/Pembimbing
<u>Fitriyah, S.Sos., MM</u>
NIP. 19760924 200801 2 012 | : | () |
| 3. Penguji Utama
<u>Drs. Agus Sucipto, MM</u>
NIP. 19670816 200312 1 001 | : | () |

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,



Dr. H. Anisahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hikmah
 NIM : 12510039
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa “SKRIPSI” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PROSEDUR DAN PENGAWASAN PEMBERIAN KREDIT UNTUK MEMEMPERTAHANKAN LIKUIDITAS PERUSAHAAN PADA PT. BPR BATUARTOREJO TAHUN 2012-2014

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 05 Januari 2017

Hormat saya,



Nur Hikmah

NIM : 12510039

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Nama : Nur Hikmah
NIM : 12510039
Jurusan/Prodi : Manajemen/Keuangan
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : PROSEDUR DAN PENGAWASAN PEMBERIAN KREDIT
UNTUK MEMPERTAHANKAN LIKUIDITAS PERUSAHAAN PADA PT. BPR
BATU ARTOREJO TAHUN 2012-2015

Mengizinkan jika karya ilmiah saya (skripsi) dipublikasikan melalui website perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara keseluruhan (*full teks*).

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 05 Januari 2017

Dosen Pembimbing

Fitriyah, S.Sos., MM
NIP. 19760294 20801 2012

Mahasiswa



Nur Hikmah
NIM. 12510039

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukurku kepada Allah SWT,

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk keluarga tercinta. Khususnya Ayahanda Moch. Riza Pahlepi dan Ibunda Hajra Damang yang telah mendidik dan memberikan cinta kasihnya dengan memberi semangat yang tak terkira serta terus mendo'akan dalam selesainya skripsi ini. Adikku tersayang Syamsu Rijal yang telah menjadi motivasi saya dalam menyelesaikan studi untuk menggapai cita-cita masa depan. Maafkan masih belum bisa jadi kakak yang baik untuk menjadi panutan. Tapi aku akan selalu berusaha yang terbaik.

Terima kasih untuk Nunaaku (Cahyantika Maulina) yang selalu setia dan bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi teman gilaku, teman hangout, teman yang selalu mendorongku untuk tak menyerah pada skripsiku dan Istiqomah KH si anak asal Lombok yang menjadi roommateku semasa di asrama, yang terus memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi, yang selalu mengingatkan untuk tidak malas.

Untuk seseorang yang selalu ada dan menemani, menjadi tempat curhatku, tangis dan tawa, juga yang selalu bersedia pontang panting ke sana kemari, seseorang yang kuharapkan akan membangun hidup bersama, seseorang yang selalu membantuku saat dalam kesusahan, yang selalu memberiku semangat dan dukungan, terima kasih ☺

Love You All....

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَ جَدَّا

“Barang siapa yang Bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil”

“Just Be Yourself”

“Love yourself”

“And believe you can do anything if you work hard”

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Kredit Secara Optimal Untuk Mempertahankan Likuiditas Perusahaan Pada PT. BPR Batu Artorejo Tahun 2012-2015”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita menuju yaitu Din Al-Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, saran dan kritik serta pengarahan dari banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Fitriyah, S.Sos.,MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi dan saran serta kesabaran dan ketulusan dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen fakultas ekonomi Universitas (UIN) Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah Moch. Riza Pahlepi, Ibu Hajra Damang, Adik Syamsu Rijal yang senantiasa memberikan do’a, kasih sayang dan dukungan secara moril dan spiritual.

7. Bapak Ichwanul Ridwan, SE.,Ak, selaku Direktur PT. BPR Batu Artorejo yang telah bersedia memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi kepada penulis.
8. Untuk tante Dewi Cholilah, omku Muslih Ali, Budhe Nur Hayati, budhe Muhammadah serta seluruh keluarga lainnya.
9. Untuk seseorang yang tidak pernah berhenti menemani dan memberikan semangat serta mendo'akan untuk penulis ☺
10. Bestfriend di Grup Whatsapp "Distance Fighter" : M. Fahmi Nasrulloh, Mufrodatul Halimah dan Serli Evidiasari yang telah memberi motivasi yang luar biasa. ☺
11. Untuk Bestieku Cahyantika Maulina, Nafiatun Nur Rohmah, Khotmi Puji Astuti yang selalu siap sedia memberikan dukungan ekstra ☺
12. Teman Kampus: Mbak Choi, Kak Rofi, Bella, Aulia, Ananda Riski, Fikri, Andika, yang senantiasa memberikan dukungan serta do'a.
13. Roommate Asrama Faza 22 : mbak Afifah Zulkarnia, Istiqomah Khairunnisah, Oki Ulyani, mbak Uswatun Khasanah, mbak Nala Hafidhotu Rohmani Aly, mbak Lisda Miftahul Aini, Yushini K Matin.
14. Dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kelemahan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Malang, 19 November 2016

Penulis

Nur Hikmah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK INDONESIA.....	xv
ABSTRAK INGGRIS	xvi
ABSTRAK ARAB	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis	18
2.2.1 Kredit	18
2.2.1.1 Unsur-Unsur Kredit.....	19
2.2.1.2 Tujuan dan Fungsi Kredit.....	21
2.2.1.3 Jenis-Jenis Kredit	23
2.2.1.4 Jaminan Kredit	28
2.2.1.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	28
2.2.2 Prosedur Dalam Pemberian Kredit	33
2.2.3 Pengawasan Kredit	37
2.2.3.1 Tujuan Pengawasan Kredit.....	38
2.2.3.2 Pelaksanaan Pengawasan Kredit	39
2.2.4 Likuiditas	40
2.2.4.1 Jenis dan Sumber Alat Likuid	41
2.2.4.2 Alat Ukur Likuiditas.....	44
2.2.4.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Likuiditas	46
2.2.4.4 Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Likuiditas.....	48
2.2.4.5 Strategi Mempertahankan Likuiditas	49
2.2.5 Kredit Dalam Pandangan Islam	51

2.2.5.1 Analisis Kredit.....	52
2.2.5.2 Jangka Waktu Pembayaran	53
2.2.5.3 Pengawasan Kredit.....	53
2.2.6 Likuiditas Dalam Pandangan Islam	54
2.3 Kerangka Berfikir	55

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
3.2 Lokasi Penelitian.....	57
3.3 Subyek Penelitian.....	58
3.4 Data dan Jenis Data.....	58
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.6 Analisis Data.....	60

BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data dan Hasil Penelitian	67
4.1.1 Sejarah PT. BPR Batu Artorejo	67
4.1.2 Visi dan Misi PT. BPR Batu Artorejo	68
4.1.3 Struktur Organisasi PT. BPR Batu Artorejo	69
4.1.4 Job Description PT.....	71
4.1.5 Susunan Kepengurusan PT. BPR Batu Artorejo	79
4.1.6 Sumber Daya Manusia PT. BPR Batu Artorejo	80
4.1.7 Jenis Usaha PT. BPR Batu Artorejo	81
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	84
4.2.1 Prosedur dan Pengawasan Pemberian Kredit PT. BPR	84
Batu Artorejo	
4.2.1.1 Prosedur Pemberian Kredit PT. BPR Batu.....	84
Artorejo	
4.2.1.2 Pengawasan Kredit	91
4.2.2 Analisis Rasio Likuiditas dan Strategi Mempertahankan. 95	
Likuiditas PT. BPR Batu Artorejo	
4.2.2.1 Likuiditas.....	95
4.2.2.2 Strategi Mempertahan Likuiditas PT. BPR Batu ..	100
Artorejo	

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.2	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	18
Tabel 4.1	Kepemilikan Saham PT. BPR Batu Artorejo	80
Tabel 4.2	Jumlah Karyawan PT. BPR Batu Artorejo	80
Tabel 4.3	Perhitungan <i>Cash Ratio</i> PT. BPR Batu Artorejo	96
Tabel 4.4	Perhitungan Rasio LDR PT. BPR Batu Artorejo	97
Tabel 4.5	Perhitungan Rasio LAR PT. BPR Batu Artorejo	98
Tabel 4.6	Perhitungan Rasio NPL PT. BPR Batu Artorejo	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Aset, Kredit yang Diberikan dan Simpana Pihak 6 Ketiga	
Gambar 1.2 Tingkat <i>Cash Ratio</i> , LDR, LAR dan NPL PT. BPR Batu 7 Artorejo Tahun 2012-2015	
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Bukti Konsultasi
Lampiran 3	Biodata Peneliti



ABSTRAK

Nur Hikmah, 2016, SKRIPSI. Judul: “Prosedur dan Pengawasan Pemberian Kredit Untuk Mempertahankan Likuiditas Perusahaan Pada PT. BPR Batu Artorejo Tahun 2012-2015”

Pembimbing : Fitriyah, S.Sos.,MM

Kata Kunci : Prosedur Pemberian Kredit, Pengawasan Pemberian Kredit, dan Likuiditas

Prosedur pemberian kredit dan pengawasan kredit merupakan suatu hal yang erat kaitannya dalam mengurangi terjadinya kredit bermasalah dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan pengawasan pemberian kredit dan strategi mempertahankan likuiditas pada PT. BPR Batu Artorejo.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan BPR dan menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio likuiditas yaitu *Cash ratio*, *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Loan to Asset Ratio* (LAR) dan *Net Performing Loan* (NPL).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur dan pengawasan pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Batu Artorejo bisa dikatakan cukup baik. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat likuiditas belum sepenuhnya optimal, hal ini ditunjukkan pada rasio LDR yang menurun akibat penyaluran kredit yang begitu besar dan tingkat kredit macet. Namun jika dilihat dari rasio NPL yang terus menurun menunjukkan bahwa prosedur dan pengawasan yang diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat penyaluran kredit.

ABSTRACT

Nur Hikmah, 2016, Thesis. Title: "The Procedures and Control in Giving credit To Maintain Liquidity of The Company at PT. BPR Batu Artorejo Year of 2012-2015 "

Supervisor : Fitriyah, S. Sos., MM

Keywords :Credit Lending Procedures, Credit Lending Monitoring, and Liquidity

Credit lending procedures and credit controls are closely related to reducing the crunch credit in a company. Therefore, this study aimed to determine the procedures and supervision of credit lending to maintain liquidity at PT. BPR Batu Artorejo.

This research was a qualitative descriptive. It was done by conducting interviews with the parties that were directly related to the BPR and analyzing financial statements using liquidity ratio: *Cash ratio*, *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Loan to Asset Ratio* (LAR) and *Net Performing Loan* (NPL).

The results of this research indicated that the credit lending procedures and controls that was applied by PT. BPR Batu Artorejo can be quite good. However, when viewed from the liquidity level had not been fully optimized. This was shown in the decreased LDR ratio because of giving great and the level of bad debts. However, if viewed from the NPL ratio continued to decline indicated that the procedures and controls were applied properly and in accordance with the provisions to minimize the occurrence of errors at the time of credit lending.

المستخلص

نور حكمة, 2016، بحث جامعي. العنوان: "الإجراء والاشرافعلى إدارة الإقراض للحفاظ السيولة الشركة في الشركة المتحدة BPR باتو أرتوريچوالسنة 2015-2012"

المشرفة : فطرية، الماجستير

كلمات الرئيسية : الإجراء والاشراف على الادارة الإقراض، والسيولة

الإجراء والاشراف على الادارة الإقراض همامسألثان التي ترتبط في تخفيض أزمة الائتمان في الشركة. ولذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الإجراء والاشراف على الادارة الائتمان للحفاظ على السيولة في الشركة المتحدة BPR باتو أرتوريچو

هذا البحث هو وصفي النوعي. استعملت بطريق إجراء مقابلات مع الأطراف التي ترتبط مباشرة إلى BPR وتحليل القوائم المالية باستخدام نسبة السيولة (*Cash ratio*, *LDR*, *NPL* و *LAR*)

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الإجراء والاشراف على الادارة الإقراض التي تطبقها بالشركة المتحدة

باتو أرتوريچو يمكن أن يكون جيدا جدا. ومع ذلك، عندما ينظر إليها من مستوى السيولة BPR

انخفاضها بسبب الادارة الائتمان كبيرة جدا ومستوى الديون *LDR* لم الأمثل تماما. ويظهر هذا في نسبة

استمرت في الانخفاض يشير إلى أن تطبيق *NPL* المعدومة. ومع ذلك، إذا ما نظر إليها من نسبة

الإجراء والاشراف صحيحا ووفقا لأحكام التي تخفض بوقوع أخطاء في وقت التوزيع الإقراض

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir semua sektor usaha tidak bisa terlepas dari jasa perbankan. Perkembangan dunia perbankan saat ini terlihat semakin kompleks, dengan berbagai produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Perbankan dipandang sebagai inti dari sistem perekonomian di setiap negara dimana arus ekonomi dan keuangan mengalir di dalamnya. Hal ini terkait dengan fungsi utama bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan sebagainya yang selanjutnya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk penanaman dana melalui kredit.

Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank sendiri merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Hal ini sesuai dengan fungsi bank yaitu sebagai *financial intermediary intitutions* yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk berbagai tujuan.

Jenis bank ada dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang sama-sama menjalankan fungsi dan kegiatannya namun yang membedakan adalah BPR dalam kegiatannya tidak melakukan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan tidak menerima simpanan berupa giro. Menurut Ismail (2010:1) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya dan menyalurkan dana. BPR bertujuan untuk menunjang pelaksanaan berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya dan menyalurkan dana. BPR bertujuan untuk menunjang pelaksanaan berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya dan menyalurkan dana. BPR bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. [Http://bprkita.blogspot.co.id/](http://bprkita.blogspot.co.id/) Sasaran BPR ialah untuk melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang kecil, pegawai dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan.

Adanya fokus pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, maka BPR diminta berkontribusi besar dan meningkatkan perannya dalam penyaluran kreditnya kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah pedesaan. Di masa mendatang BPR diharapkan dapat menjadi penopang utama pertumbuhan perekonomian, meski sejauh ini bank-bank umum memegang kendali dalam penyaluran kreditnya. Untuk memaksimalkan peran BPR dalam menopang UMKM dan menghadapi persaingan di antara lembaga keuangan lainnya, maka

kinerja keuangan BPR harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan BPR tersebut dengan tidak hanya pada saat membutuhkan dana untuk membiayai usahanya, namun juga menempatkan dananya di BPR. Hal ini menentukan sampai sejauh mana BPR menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Pokok dari kegiatan usaha BPR adalah kredit. Sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat berupa simpanan dan deposito lebih banyak dialokasikan pada kegiatan kredit BPR. Perkembangan BPR yang cukup pesat saat ini dikarenakan sasaran BPR lebih mengarah pada kebutuhan atau kredit yang dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya ataupun untuk konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu agar kredit yang diberikan BPR dapat maksimal dan tepat sasaran, maka diperlukan pengelolaan kredit yang baik mulai dari proses pemberian kredit hingga pengawasan yang diterapkan oleh BPR. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi BPR itu sendiri.

Apabila prosedur pemberian kredit sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka pihak bank dapat selalu mengetahui dengan baik kegiatan dan perkembangan usaha nasabahnya sehingga jika terjadi suatu masalah bank dapat segera mengetahui dan berusaha membantu untuk kepentingan bank itu sendiri. Pengawasan kredit sepenuhnya dilaksanakan untuk menghindari kredit macet. Oleh karena itu, dalam penyaluran kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan pelaksanaan yang baik dan benar. Dengan demikian betapa pentingnya sektor perkreditan bagi kehidupan

perbankan, sehingga sangatlah dibutuhkan pola pengawasan kredit yang terampil dan memadai.

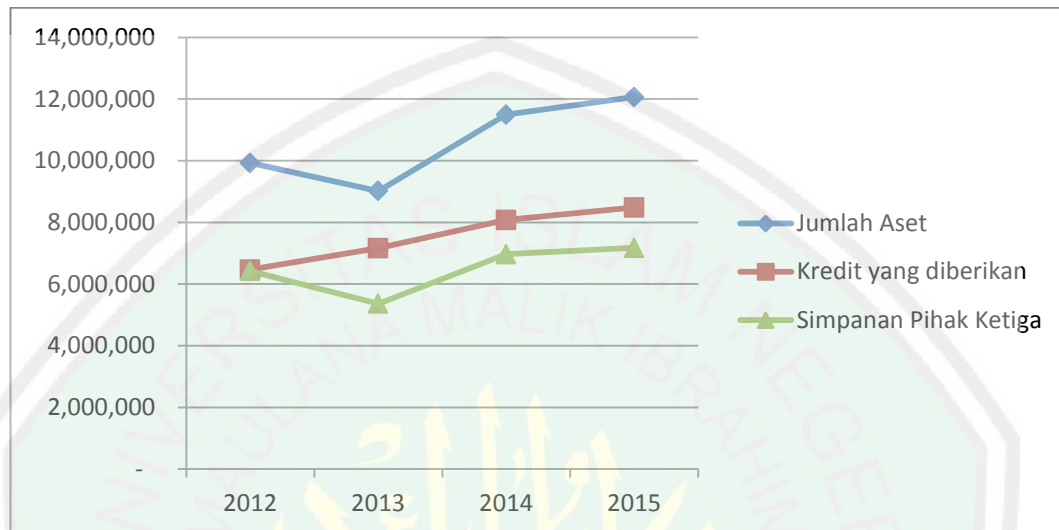
Sistem pengawasan kredit yang dilakukan dalam menjamin kepentingan bank terhadap kredit yang diberikan, maka bank menerapkan sistem pengawasan yang melalui prosedur pemberian kredit sampai pengawasan lanjutan setelah kredit diberikan kepada debitur. Di dalam proses pengawasannya sebelum pemberian kredit kepada debitur, bank meminta laporan-laporan yang diperlukan secara periodik tentang perkembangan usahanya khususnya tentang usaha yang dibiayai oleh bank sehingga bank dapat mengawasi usaha nasabahnya. Pengawasan kredit yang diberikan oleh bank sangat penting artinya bagi bank untuk menjamin kepentingannya terhadap pembayaran kembali kreditnya dan untuk memastikan digunakan sesuai rencana permohonan kredit.

Menurut Siagian (2015) dalam penelitiannya mengenai “Sistem Pengendalian Kredit Untuk Mempertahankan Likuiditas Pada PT. Bank Sumut” pengendalian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut sudah baik dengan menerapkan analisis 5C. Menurut Widyaningrum (2010) dalam penelitiannya mengenai “Efektivitas Pengelolaan Kredit Dalam Upaya Peningkatan Likuiditas Pada PT. BPR GROGOL JOYO” hasilnya menunjukkan bahwa PT. BPR Grogol Joyo telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI dengan mengupayakan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas moneter tersebut. Menurut Martiana (2013) dalam penelitiannya mengenai “Tinjauan Atas Analisis Prosedur Pemberian Kredit Serta Pencatatan Akuntansi Kredit Kredit Pensiun Pada PT. Bank Jabar Banten KCP. IPDN Jatinangor Kab. Sumedang” hasilnya

menunjukkan bahwa dalam prosedur pemberian kredit pension sudah sesuai dengan teori mengenai prosedur pemberian kredit yang dikemukakan oleh Kasmir. Menurut Fatich (2012) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Prosedur Pemberian Predit Pada Bank Rakyat Indonesia Ka. Unit Sawojajar” hasilnya menunjukkan bahwa dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank BRI sudah memenuhi persyaratan prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan analisis 5C dan 7P.

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batu Artorejo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan. Awal didirikannya PT. BPR Batu Artorejo pada tanggal 4 Mei 1993 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 1994. Dimana dalam kegiatannya adalah menghimpun dana masyarakat, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan, menempatkan dana, dan pelelangan agungan yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pada tahun 2012-2015, jumlah kredit yang disalurkan selalu meningkat selama tiga tahun terakhir. Berikut adalah total aset yang dimiliki oleh PT. BPR Batu Artorejo, jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat dan simpanan pihak ketiga selama tiga tahun terakhir:

Gambar 1.1
Jumlah Aset, Kredit yang diberikan, dan Simpanan Pihak Ketiga
PT. BPR Batu Artorejo tahun 2012-2015.



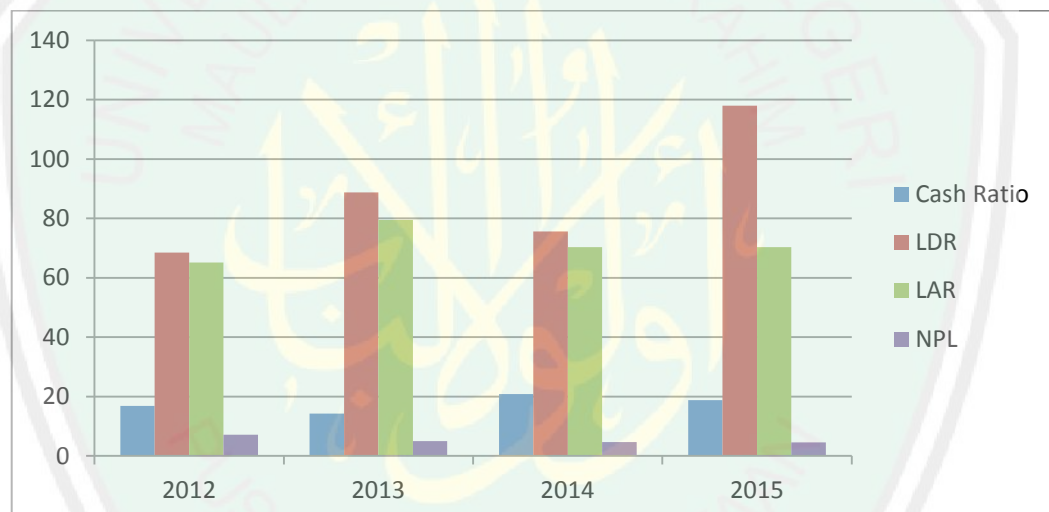
Sumber : PT. BPR Batu Artorejo

Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa kredit yang diberikan oleh PT. BPR Batu Artorejo dari tahun 2012 hingga 2015 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2012 kredit yang diberikan sebesar 65% dari total aset perusahaan yaitu Rp. 6.468.156. Tahun 2013 kredit yang diberikan sebesar 79% dari total aset perusahaan dan meningkat sebesar Rp. 695.754. Pada tahun 2014 kredit yang diberikan sebesar 70% dari total aset dan juga meningkat sebesar Rp. 914.211. Sedangkan untuk simpanan pihak ketiga mengalami naik turun yaitu pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar Rp. 1.055.987 dari Rp. 6.418.619 pada tahun 2012, akan tetapi pada tahun 2014 simpanan pihak ketiga kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.602.874.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jika dalam penyalurannya, kredit yang diberikan

melebihi batas akan menimbulkan suatu resiko yaitu munculnya indikasi terjadinya kredit kurang lancar, diragukan dan macet yang dapat diperhitungkan dengan menggunakan rasio *Cash Ratio*, *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Loan to Asset Ratio* (LAR) dan *Non Performing Loan* (NPL). Berikut adalah tingkat *Cash Ratio*, LDR, LAR dan NPL PT. BPR Batu Artorejo tahun 2012-2015:

Gambar 1.2
Cash Ratio, Loan to Deposit Ratio (LDR), Loan to Asset Ratio (LAR)
dan Net Performing Loan (NPL)
PT. BPR Batu Artorejo tahun 2012-2015



Sumber: PT. BPR Batu Artorejo, data diolah

Gambar 1.2 diatas menjelaskan bahwa apabila PT. BPR Batu Artorejo menyalurkan dana kreditnya yang begitu besar bahkan hampir mencapai 80% dari total aset yang dimiliki perusahaan, maka hal ini akan berakibat terganggunya likuiditas BPR tersebut. Dilihat dari tingkat *Cash Ratio*, dari tahun 2012 sampai 2015 dalam kondisi yang sehat meskipun mengalami naik turun. Sedangkan jika dilihat dari rasio LDRnya pada tahun 2012, 2014 dan 2015 dalam keadaan yang kurang sehat karena tidak sesuai dengan batas ketentuan yang ditetapkan meski pada tahun 2013 tingkat LDR dalam keadaan yang sehat. Tingkat NPL BPR

melebihi batas maksimum 5%, yaitu 7,10% yang berarti BPR dalam keadaan yang tidak sehat. Hal ini terjadi karena sumber dana yang tersimpan dari masyarakat terpakai dalam pemakaian kredit pada tahun tersebut. Namun pada tahun berikutnya tingkat NPL BPR menurun yaitu pada tahun 2013 tingkat NPL sebesar 4,94%, pada tahun 2014 tingkat NPL sebesar 4,66%, dan pada tahun 2015 NPL sebesar 4,54% yang berarti BPR dalam keadaan yang sehat karena NPLnya tidak melebihi batas maksimum. Akan tetapi, ketika jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2013 dan 2014 lebih besar dari tahun 2012 bahkan hampir mencapai 80% total aset yang dimiliki BPR, tetapi tingkat NPL terus berkurang. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada tahun 2012.

Berlatar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Prosedur dan Pengawasan Pemberian Kredit Untuk Mempertahankan Likuiditas Perusahaan Pada PT. BPR Batu Artorejo Tahun 2012-2015”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan pemberian kredit pada PT. BPR Batu Artorejo ?
2. Bagaimana keadaan likuiditas dan strategi mempertahankan likuiditas pada PT. BPR Batu Artorejo ?

1.3 Tujuan

Adapun penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan Pengawasan likuiditas pada PT. BPR Batu Artorejo.
2. Untuk mengetahui keadaan likuiditas dan strategi mempertahankan likuiditas pada PT. BPR Batu Artorejo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa kuliah dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata.
- b. Menambah pengalaman dan melatih untuk berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan.

2. Bagi PT. BPR Batu Artorejo

Hasil akhir ini diharapkan memberikan informasi, saran-saran serta rujukan bagi BPR mengenai prosedur pelaksanaan dan pengawasan pemebrian kredit secara optimal untuk mempertahankan likuiditas.

3. Bagi Pihak Lain

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini serta menjadi bahan masukan dan mengatasi permasalahan yang sejenis.

1.5 Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini agar tidak memperluas permasalahan, yaitu khusus analisis prosedur pelaksanaan dan pengawasan pemberian kredit untuk mempertahankan likuiditas (Studi kasus pada PT. BPR Batu Artorejo pada periode 2012-2015). Adapun rasio likuiditas yang penulis gunakan berdasarkan menurut Dendawijaya (2005:114) adalah *Cash Ratio*, *Loan to Deposit Ratio*, dan *Loan to Asset Ratio*, serta untuk mengukur kualitas kredit menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2015) “Sistem Pengendalian Kredit Untuk Mempertahankan likuiditas Pada PT. Bank Sumut KCP GUBSU” hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian kredit pada saat penyaluran kredit PT. Bank Sumut KCP GUBSU sudah baik dengan menerapkan prinsip 5C. Pengendalian yang dilakukan dengan wawancara, melakukan *check on the spot*, melakukan *BI Checking*, melihat dari status dan riwayat hidup, *checking in club*, pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional), melakukan pengecekan dengan *supplier*, mempelajari *character* calon debitur dari masyarakat setempat, dan mencari lebih lanjut mengenai profesi calon debitur. Pengendalian kredit untuk mempertahankan likuiditas yang dilakukan yaitu dengan melakukan ekspansi DPK, investasi surat berharga, membangun pertumbuhan bisnis melalui *customer relationship management* yang berkesinambungan. Selain itu PT. Bank Sumut KCP GUBSU dinilai memiliki dana menganggur yang belum dioptimalkan penyalurannya. Hal ini akan memberikan beban bunga pembayaran simpanan nasabah di Bank tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum (2010) “Analisis Efektifitas Pengelolaan Kredit Dalam Upaya Peningkatan Tingkat Likuiditas Pada PT. BPR Grogol Joyo” hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan kredit dalam upaya peningkatan likuiditas yang dilakukan PT. BPR Grogol Joyo adalah

baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI dan senantiasa memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini dapat tercermin dari beberapa indikator rasio keuangan seperti ditetapkan. Hal ini dapat tercermin dari beberapa indikator rasio keuangan seperti NPL cenderung mengalami penurunan bahkan pada triwulan IV mendekati 5%, meskipun indikator LDRnya cenderung meningkat tiap triwulannya. Disisi lain *Quick Ratio* termasuk rendah yang merupakan kebijakan yang diambil oleh bank agar tidak mengalami *idle fund* untuk dana yang ditempatkan dan *Loan to Asset Ratio* menunjukkan hasil yang baik. ROA mengalami peningkatan yang menunjukkan kinerja bank dalam meningkatkan keuntungan dikatakan baik, sedangkan BOPO mengalami penurunan yang berarti manajemen belum mampu melakukan efisiensi biaya operasional. Laba operasional dan Non Operasional nilainya baik sehingga meningkatkan pendapatan bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Martiana (2013) “Tinjauan Atas Analisis Prosedur Pemberian Kredit Serta Pencatatan Akuntansi Kredit Pensiun Pada PT. Bank Jabar Banten KCP. IPDN Jatinangor Kab. Sumedang” hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prosedur pemberian kredit pensiun sudah sesuai dengan teori yang ada. Dalam hal ini bank menetapkan beberapa tahap dalam pengajuan kredit yang meliputi tahap nasabah pengajuan berkas-berkas, bagian penyelidikan berkas pinjaman, wawancara, keputusan pemberian kredit beserta penandatanganan kredit, realisasi kredit dan penyaluran kredit. Dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan dalam tahap penyelidikan berkas-berkas nasabah oleh bagian kreditnya dimana dalam persyaratan pengajuan kredit

nasabah tidak lengkap, bank tetap melanjutkan tahap berikutnya. Dalam pencatatan pemberian kredit pada PT. Bank Jabar Banten Kcp. IPDN Jatinangor sudah sesuai dengan teori yang ada, dimana pencatatan kredit terdiri dari persetujuan dan pemberian realisasi (RLA), penarikan tunai fasilitas kredit nasabah, pendapatan provosi (PMC), pembayaran manual (TRA), pelunasan pinjaman komponen/*Revolving* (RLP), biaya pelunasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatich (2012) “Pengaruh Prosedur, Pencairan, Dan Pengawasan Pemberian Kredit Terhadap Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Ka. Unit Sawojajar Malang” hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada Bank BRI Ka. Unit Sawojajar sudah memenuhi persyaratan prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan 5C dan 7P. Variabel bebas yang terdiri dari prosedur pemberian kredit, pencairan kredit, dan pengawasan kredit secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap resiko kredit macet. Variabel pengawasan kredit merupakan variabel bebas yang sangat berpengaruh terhadap resiko kredit macet, dimana pengawasan kredit merupakan sebuah kunci dalam mengendalikan dan memantau kegiatan usaha nasabah debitur dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan seperti mengunjungi rumah nasabah tiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Sehingga debitur dapat membayar kredit secara teratur.

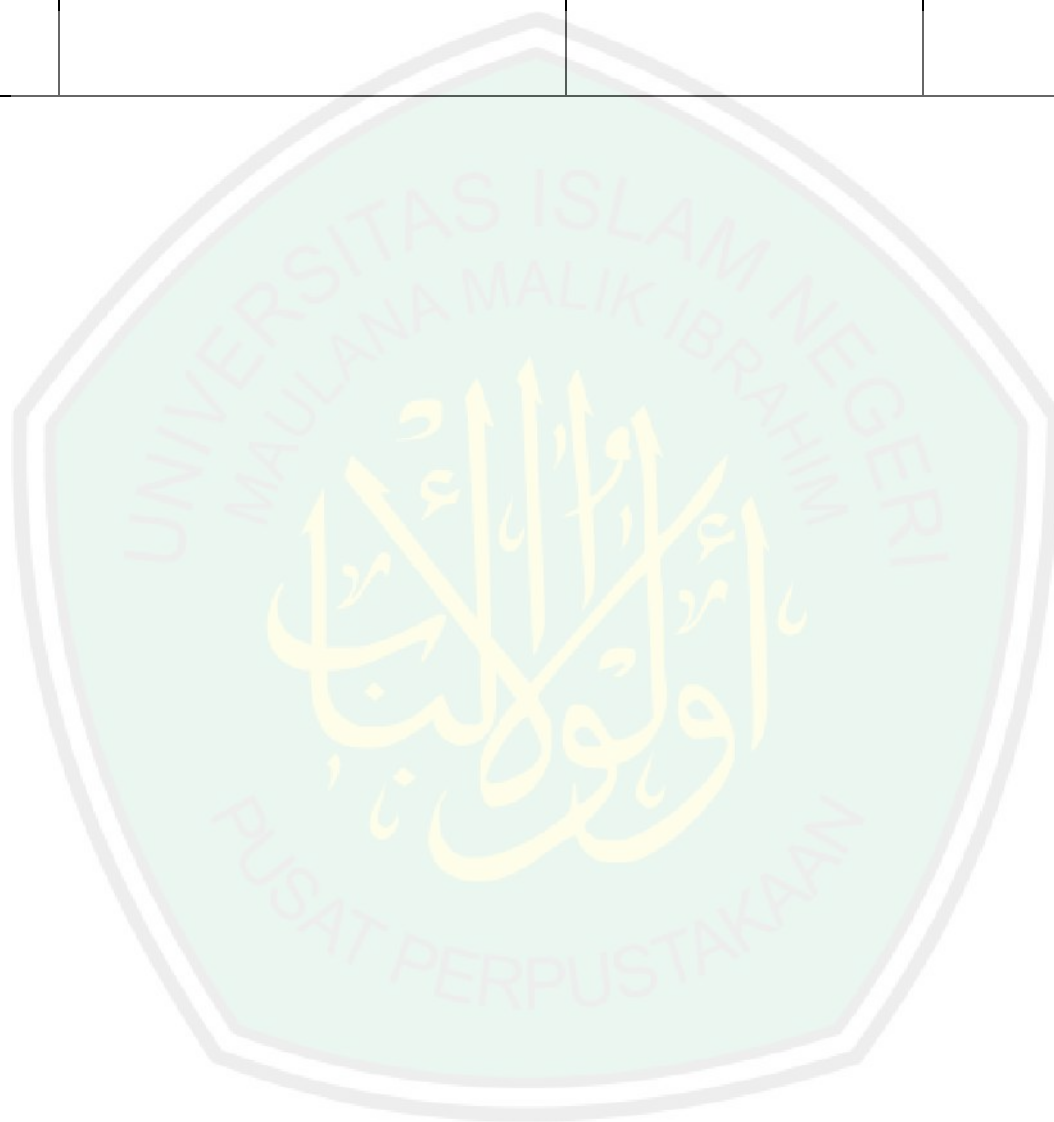
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel & Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil
1.	Luthvia Safitri Siagian (2015) “Sistem Pengendalian Kredit Untuk Mempertahankan likuiditas Pada PT. Bank Sumut KCP GUBSU”	Sistem Pengendalian Kredit dan Likuiditas	Kualitatif deskriptif	1. Pengendalian kredit pada saat penyaluran kredit PT. Bank Sumut KCP GUBSU sudah baik dengan menerapkan prinsip 5C. Pengendalian yang dilakukan dengan wawancara, melakukan <i>check on the spot</i>, melakukan BI <i>Checking</i>, melihat dari status dan riwayat hidup, <i>checking in club</i>, pengecekan DHN, melakukan pengecekan dengan <i>supplier</i>, mempelajari <i>character</i> calon debitur dari masyarakat setempat, dan mencari tau lebih lanjut mengenai profesi calon debitur. 2. Pengendalian kredit untuk mempertahankan likuiditas yang dilakukan yaitu melakukan ekspansi DPK, investasi surat berharga, membangun pertumbuhan bisnis melalui <i>customer relationship management</i> yang berkesinambungan.
2.	Septian Fika Widyaningrum (2010) “Analisis Efektifitas Pengelolaan Kredit Dalam Upaya Peningkatan Tingkat Likuiditas Pada PT. BPR Grogol Joyo”	Pengelolaan Kredit dan Likuiditas	Kualitatif deskriptif	1. Efektivitas pengelolaan kredit dalam upaya peningkatan likuiditas yang dilakukan PT. BPR Grogol Joyo adalah baik sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh BI dan senantiasa memenuhi standar yang di

				tetapkan. 2. Disisi lain <i>Quick Ratio</i> termasuk rendah yang merupakan kebijakan yang diambil oleh bank agar tidak mengalami <i>idle fund</i> untuk dana yang ditempatkan, <i>Loan to Asset ratio</i> dan <i>Cash Ration</i>nya menunjukkan nilai yang sehat. Sedangkan indikator rentabilitas yang terdiri dari ROA mengalami peningkatan yang menunjukkan kinerja bank dalam meningkatkan keuntungan dikatakan baik, sedangkan BOPO mengalami penurunan yang berarti manajemen belum mampu melakukan efisiensi biaya operasional. Laba operasional dan Non Operasional nilainya baik sehingga meningkatkan pendapatan bank.
3.	L. Vina Maya Martiana (2013) "Tinjauan Atas Analisis Prosedur Pemberian Kredit Serta Pencatatan Akuntansi Kredit Pensiun Pada PT. Bank Jabar Banten KCP. IPDN Jatinangor Kab. Sumedang"	Prosedur pemberian kredit dan pencatatan akuntansi kredit Pensiun	Kualitatif deskriptif	1. Dalam prosedur pemberian kredit pensiun sudah sesuai dengan teori yang ada. Dalam hal ini bank menetapkan beberapa tahap dalam pengajuan kredit yang meliputi tahap nasabah pengajuan berkas-berkas, bagian penyelidikan berkas pinjaman, wawancara, keputusan pemberian kredit beserta penandatanganan kredit, realisasi kredit dan penyaluran kredit. 2. Dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan dalam tahap penyelidikan

				berkas-berkas nasabah oleh bagian kreditnya dimana dalam persyaratan pengajuan kredit nasabah tidak lengkap, bank tetap melanjutkan tahap berikutnya. 3. Dalam pencatatan pemberian kredit pada PT. Bank Jabar Banten Kcp. IPDN Jatinangor sudah sesuai dengan teori yang ada, dimana pencatatan kredit terdiri dari persetujuan dan pemberian realisasi (RLA), penarikan tunai fasilitas kredit nasabah, pendapatan provosi (PMC), pembayaran manual (TRA), pelunasan pinjaman komponen/<i>Revolving</i> (RLP), biaya pelunasan.
4.	Cicik Rohmani Fatich (2012) "Pengaruh Prosedur, Pencairan, Dan Pengawasan Pemberian Kredit Terhadap Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Ka. Unit Sawojajar Malang"	Prosedur kredit dan risiko kredit	1. Metode : Kuantitatif Deskriptif 2. Analisis Data: a. Uji validitas b. Uji realibilitas c. Analisis linier berganda	1. Prosedur pemberian kredit pada Bank BRI Ka. Unit Sawojajar sudah memenuhi persyaratan prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan 5C dan 7P. 2. Variabel bebas yang terdiri dari prosedur pemberian kredit, pencairan kredit, dan pengawasan kredit secara secara simultan berpengaruh signifikan terhadap resiko kredit macet.

				3. Variabel pengawasan kredit merupakan variabel bebas yang sangat berpengaruh terhadap resiko kredit macet, dimana pengawasan kredit merupakan sebuah kunci dalam mengendalikan dan memantau kegiatan usaha nasabah debitur dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan
--	--	--	--	---



Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Luthvia Safitri Siagian (2015) “Sistem Pengendalian Kredit Untuk Mempertahankan likuiditas Pada PT. Bank Sumut KCP GUBSU”	-Kualitatif deskriptif -Kredit	-Sistem pengendalian
2.	Septian Fika Widyaningrum (2010) “Analisis Efektifitas Pengelolaan Kredit Dalam Upaya Peningkatan Tingkat Likuiditas Pada PT. BPR Grogol Joyo”	-Kualitatif Deskriptif -Kredit -Likuiditas	-Efektivitas
3.	L. Vina Maya Martiana (2013) “Tinjauan Atas Analisis Prosedur Pemberian Kredit Serta Pencatatan Akuntansi Kredit Pensiun Pada PT. Bank Jabar Banten KCP. IPDN Jatinangor Kab. Sumedang”	-Kualitatif Deskriptif -Prosedur pemberian kredit	-Pencatatan akuntansi kredit pension
4.	Cicik Rohmani Fatich (2012) “Pengaruh Prosedur, Pencairan, Dan Pengawasan Pemberian Kredit Terhadap Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Ka. Unit Sawojajar Malang”	-Prosedur Kredit	-Kuantitatif Deskriptif

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Kredit

Menurut Kasmir (2000:72) asal mula kredit berasal dari kata *credere* yang artinya kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Menurut Hasibuan (2001:87) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati. Menurut Simorangkir (2004:100) kredit bersifat kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko, dan pertukaran ekonomi di masa mendatang. Menurut UU Perbankan RI No. 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.2.1.1 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2000:74-6) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan/dicairkan sudah dilakukan penelitian dan penyeledikan yang mendalam tentang nasabah.

b. Kesepakatan

Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu) akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional sedangkan

bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.1.2 Tujuan dan Fungsi kredit

Pemberian suatu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank. Menurut Kasmir (2005:96-97) adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:

a. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan).

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah penerimaan

pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa Negara, dan meningkatkan devisa Negara.

Menurut Kasmir (2005:97-85) fungsi pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si debitur.

- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

- c. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

- d. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa Negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi debitur tentu akan sapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk mengembangkan pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si debitur dengan si kreditur. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.2.1.3 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2000:76) secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:

a. Dilihat dari segi kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan untuk kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaannya terdapat dua jenis yaitu:

1) Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

2) Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit jenis ini dilihat dari pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:

1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang atau jasa.

2) Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:

1) Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

3) Kredit jangka panjang

Merupakan masa kredit yang pengembaliannya paling panjang yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Dilihat dari segi jaminan

Maksudnya adalah setiap pemberian fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dari segi jaminan adalah:

1) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Barang tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang diberikan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa barang jaminan atau orang tertentu.

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha:

- 1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat jangka pendek atau jangka panjang.
- 2) Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relative pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- 3) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
- 4) Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk membiayai usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka waktu panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

- 6) Kredit profesi, diberikan kepada kalangan profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- 8) Dan sektor-sektor usaha lainnya.

2.2.1.4 Jaminan Kredit

Menurut Kasmir (2000:80-81) dalam praktik kredit yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut.

- a. Jaminan dengan barang seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah Dan barang-barang berharga lainnya
- b. Jaminan dengan surat berharga seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat deposito, promes, wesel dan surat berharga lainnya, jaminan asuransi dan jaminan orang atau perusahaan.

2.2.1.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2007:104) sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Kriteria penilaian kredit yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Penjelasan prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Character*

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang yang bersikap pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Character merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Menurut Dendawijaya (2005) informasi mengenai calon debitur dapat diperoleh dengan cara bekerjasama dengan kalangan perbankan maupun kalangan bisnis lainnya. Informasi dari kalangan perbankan diperoleh melalui surat menyurat atau koresponden antar bank yang dikenal dengan bank informasi, termasuk permohonan resmi kepada Bank Indonesia (BI) untuk memperoleh informasi tentang calon debitur, baik mengenai pribadinya maupun perusahaan atau bisnis yang dimiliki.

b. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital*

Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital adalah untuk

mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datang harus dinilai sesuai dengan sektor masing-masing. Prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Menurut Dendawijaya (2005:91) ada satu sisi lagi yang harus diketahui dalam pemberian kredit, yaitu *constraints* (kendala). Kendala merupakan faktor hambatan atau rintangan berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan, misalnya pendirian suatu pabrik farmasi yang akan memproduksi obat antibiotika dan vitamin, tetapi merencanakan untuk mengolah ganja dan ecstasy, maka permohonan kredit ini sulit untuk dikabulkan.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 7P kredit dapat dikelaskan sebagai berikut:

1. *Personality*

Personality (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik maka kredit dapat diberikan. Sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak dapat diberikan. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya. Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Purpose (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini akan menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur

disetujui atau ditolak. Apabila kredit digunakan sebagai kegiatan konsumtif maka kredit tidak dapat diberikan, tetapi jika digunakan sebagai modal kerja (produktif) maka kredit dapat diberikan. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan sehingga dapat dipertimbangkan.

4. *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan dan mempunyai prospek atau sebaliknya. Prospect adalah prospek perusahaan dimasa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek akan ditolak. Oleh karena itu analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar.

5. *Payment*

Payment (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat memperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau

akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2.2 Prosedur Dalam Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2005:110) prosedur dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Menurut Kasmir (2007:113) prosedur pemberian kredit terdiri dari 9 tahapan yaitu:

- a. Permohonan Kredit Permohonan kredit diajukan oleh calon nasabah kepada bank, umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan resmi
 - 2) Akte pendirian perusahaan yang merupakan lembaga yang secara resmi memohonkan kredit, sekaligus menjelaskan siapa yang berwenang meminta kredit dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan penerimaan kredit, termasuk bertanggung jawab terhadap kewajiban nasabah kredit, seperti melunasi utang (angsuran) beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

3) Penjelasan atau uraian singkat tentang rencana proyek atau bisnis yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah.

4) Untuk proyek yang cukup besar dan membutuhkan jumlah kredit yang besar dilengkapi dengan suatu laporan kelayakan proyek yang disusun oleh suatu lembaga konsultan yang ditunjuk oleh calon nasabah.

5) Laporan keuangan perusahaan.

Informasi-informasi lain yang biasa selalu diminta oleh bank, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari perusahaan, izin-izin yang telah diperoleh dalam rangka pembangunan proyek maupun bisnis yang telah berjalan, rekening perusahaan pada beberapa bank.

b. Pemeriksaan Berkas pinjaman bertujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan dan sudah benar.

c. Wawancara ke I merupakan penyelidikan kepada calon debitur dan berhadapan langsung dengan calon peminjam, untuk meyakini apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan kelengkapan seperti yang sudah ditentukan oleh bank.

d. Pemeriksaan Lapangan (analisis kredit, merupakan pemeriksaan lapangan dengan meninjau berbagai objek usaha atau jaminan, sehingga apa yang

dilihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Menurut Kasmir (2007:104) Analisis kredit yang dilakukan berdasarkan dua metode, yaitu:

- 1) Analisis 5C, yang meliputi *character, capital, capacity, condition of economy, collateral*.
 - 2) Analisis 7P, yang meliputi *personality, party, perpose, prospect, payment, profitability, dan protection*.
- e. Wawancara ke II, merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan.
- f. Keputusan Kredit, menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya, bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan.
- g. Perjanjian Kredit (akad kredit) dipersiapkan oleh seorang notaris publik yang ditunjuk bank atau dipilih oleh calon nasabah (atau dasar kesepakatan bersama antara bank dan calon nasabah). Isi perjanjian kredit berdasarkan masukan dari pihak bank adalah sebagai berikut:
- 1) Pihak pemberi kredit (bank yang bersangkutan)
 - 2) Pihak penerima kredit (perusahaan nasabah)
 - 3) Tujuan pemberian kredit, tergantung pada jenis bisnis yang akan dibangun, modal kerjanya
 - 4) Besarnya biaya proyek, termasuk investasi tetap, kebutuhan modal kerja
 - 5) Besarnya kredit yang akan diberikan bank
 - 6) Tingkatan bunga kredit
 - 7) Biaya-biaya lain yang harus dibayar nasabah kredit

- 8) Jangka waktu pengembalian kredit
 - 9) Jadwal pembayaran angsuran kredit dan pembayaran bunga kredit
 - 10) Jaminan kredit
 - 11) Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kredit dicairkan
 - 12) Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah kredit selama kredit belum dilunasi, dan kewajiban mengasuransikan semua aktiva tetap pada proyek yang dibiayai bank.
 - 13) Hak-hak yang dimiliki bank selama kredit belum dilunasi Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaries public ditandatangani tiga pihak (bank, nasabah, dan notaris publik) serta dicatatkan dan didaftarkan oleh notaris publik pada pengadilan negeri yang sesuai dengan domisili dari bank pemberi kredit sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak.
- h. Realisasi Kredit (Pencairan Kredit), pencairan kredit yang diajukan oleh debitur hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan yang ditandatangani kedua pihak (bank dan debitur) serta dicatat dihadapan notaris publik. Persyaratan untuk pencairan kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:
- 1) Perjanjian kredit telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur.
 - 2) Penarikan kredit telah sesuai dengan kebutuhan proyek.
 - 3) Penarikan kredit telah sesuai dengan jadwal pembangunan proyek.
 - 4) Permohonan pencairan kredit didukung oleh dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pencairan kredit.

5) Besarnya kredit harus sesuai dengan perbandingan yang disepakati antara dana dan bersumber dari nasabah/debitur dan pembiayaan dari bank. Pencairan kredit/pembayaran oleh bank dilakukan dengan langsung dikirimkan ke rekening nasabah atau dialamatkan ke rekening-rekening perusahaan yang menjadi rekanan nasabah.

- i. Penyaluran/penarikan, merupakan pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil berdasarkan ketentuan dan tujuan kredit.

2.2.3 Pengawasan Kredit

Menurut Suhardjono (2004:230-231) pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahapan-tahapan proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya. Menurut Dendawijaya (2005:79-82) pengawasan (*monitoring*) kredit yang dilakukan bank setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit, selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. Terjadinya kegagalan kredit terutama disebabkan oleh kelalaian bank dalam melakukan pengawasan kredit.

Pengawasan kredit meliputi berbagai aspek atau kegiatan, yakni sebagai berikut:

- a. Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir, seperti penggunaan computer, *on line system*, dan sebagainya.
- b. Keharusan bagi nasabah kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit, seperti:

- 1) Laporan produksi
 - 2) Laporan penjualan
 - 3) Laporan utang dan piutang perusahaan
 - 4) Laporan keuangan (neraca, perhitungan laba/rugi, dan lain-lain)
 - 5) Laporan tenaga kerja
 - 6) Laporan asuransi aktiva tetap
 - 7) Laporan perubahan izin yang diterima dari instansi terkait.
- c. Keharusan bagi wirakredit (*account officer*) untuk melakukan kunjungan ke perusahaan ataupun proyek yang dibiayai bank, baik selama berlangsungnya pembangunan proyek maupun setelah proyek tersebut berjalan sebagai suatu usaha bisnis.
- d. Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, terutama jika pihak debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukka tanda-tanda kemungkinan terjadinya kemacetan. Konsultasi yang dilakukan sejak dini memungkinkan dapat mengurangi atau menekan kemungkinan terjadinya kegagalan proyek atau kredit macet.
- e. Adanya suatu sistem peringatan pada administrasi bank untuk memperlihatkan berbagai informasi tentang nasabah kredit yang berkaitan dengan kepatuhan kepada ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian kredit.

2.2.3.1 Tujuan Pengawasan Kredit

Menurut Suhardjono (2004:232) pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan, penjagaan dan pengawasan kredit sebagai

aset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul resiko-resiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern bank. Obyek pengawasan kredit mencakup semua pejabat bank yang terkait dengan bidang perkreditan dan semua jenis fasilitas kredit yang diberikan termasuk kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank. Kemudian pengawasan dilakukan secara berkesinambungan sejak permohonan kredit hingga pelunasan kredit. Pengawasan kredit dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan laporan yang disampaikan secara berkala atas seluruh kegiatan usaha debitur. Pengawasan langsung maupun tidak langsung dilakukan dalam rangka untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya masalah yang timbul dan beresiko bagi keamanan kredit yang diberikan.

2.2.3.2 Pelaksanaan Pengawasan Kredit

Menurut Suhardjono (2004:233) pengawasan kredit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan secara preventif dan pengawasan secara represif.

- a. Pengawasan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya masalah dalam perkreditan yang dapat dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pada setiap tahapan proses pemberian kredit mulai dari permohonan kredit hingga pelunasan kredit. Prinsip tersebut terdiri 5C dan analisis 7P, namun yang paling sering diterapkan adalah analisis 5C.
- b. Pengawasan melekat dilakukan dengan 2 tahap yaitu pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk memastikan bahwa para karyawan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang

telah ditetapkan. Kedua, dengan sistem pengendali manajemen yang dilakukan untuk mengendalikan, mengarahkan agar setiap tugas serta rencana dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- c. Sedangkan pengawasan represif dimaksudkan untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam bidang perkreditan. Pengawasan represif ini dilaksanakan dengan cara melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit dan perkembangan usaha debitur setelah mendapatkan kredit. Pengawasan ini dapat dilakukan secara aktif maupun pasif.

2.2.4 Likuiditas

Menurut Taswan (2006:96-97) likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal ini likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dalam menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank akan dikatakan likuid apabila memenuhi kategori sebagai berikut:

- a. Memegang sejumlah alat likuid, *cash asset* yang terdiri dari uang kas, rekening pada bank sentral dan rekening pada bank-bank lainnya sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.
- b. Memegang kurang dari jumlah alat-alat likuid sebagaimana disebutkan pada poin pertama, akan tetapi bank tersebut memiliki surat-surat berharga berkualitas tinggi yang dapat segera ditukar menjadi uang tanpa mengalami kerugian sebelum jatuh tempo maupun saat jatuh tempo.

- c. Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui penciptaan hutang.

Dengan memenuhi kategori likuid, maka likuiditas dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Menunjukkan bahwa bank tersebut dalam keadaan yang sehat.
2. Memungkinkan bank untuk memenuhi komitmen kreditnya.
3. Untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan.
4. Untuk menghindari dari penyalahgunaan kemudahan atau kesan negatif penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari bank sentral.
5. Memperkecil penilaian resiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan dananya.

2.2.4.1 Jenis dan Sumber Alat Likuid

Menurut Chairuddin (2002:2-3) yang berlaku umum dalam dunia perbankan, dapat disebutkan bahwa jenis-jenis alat likuid yang dimiliki oleh bank adalah:

- a. Kas atau uang tunai (kertas dan logam) yang tersimpan dalam brankas (khasanah) bank tersebut
- b. Saldo dana milik bank tersebut yang terdapat pada Bank Sentral (Saldo Giro BI)
- c. Tagihan atau deposito pada bank lain, termasuk bank korespondenChek yang diterima, tetapi masih dalam proses penguangan pada Bank Sentral dan bank korespoden. Dalam dunia perbankan, keempat jenis alat/ harta

likuid tersebut sering disebut “posisi uang” (money position) bank yang bersangkutan pada saat tertentu.

Adapun menurut sumbernya, suatu bank dapat memperoleh alat-alat likuid yang diperlukan tersebut diatas dari berbagai sumber, yaitu :

1. Asset bank yang akan segera jatuh tempo : Kredit pinjaman kepada debitur atau cicilan pinjaman yang akan jatuh tempo dapat dianggap sebagai sumber likuiditas. Oleh karena itu, dalam kondisi kebijakan uang ketat, posisi likuiditas suatu bank akan rawan apabila keseluruhan portofolio kreditnya masuk kategori evergreen. Surat-surat berharga, instrumen pasar uang seperti Bank Acceptance, Sertifikat Bank Indonesia, dan sertifikat deposito pada Bank lain yang akan segera jatuh tempo, dapat pula dianggap sebagai sumber likuiditas dalam golongan ini.
2. Pasar Uang Pasar uang adalah sumber likuiditas bank. Namun harus diakui bahwa tidak setiap bank mempunyai kemampuan untuk masuk ke pasar uang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh besarnya suatu bank dan persepsi pasar uang atas Credit Worthiness bank tersebut. Dalam hal ini, para investor yang meminjamkan uangnya ke bank akan melakukan analisa yang mendalam dan selektif terhadap tingkat dan konsistensi perkembangan pendapatan bank, kualitas asset, reputasi kesehatan manajemen, dan kekuatan modal bank.
3. Sindikasi kredit Pembentukan sindikasi kredit, selain bertujuan menyiasati legal lending limit (3L) dan menyebarkan risiko, juga bertujuan untuk menjalin hubungan dengan bankbank lain. Dengan demikian, ketika

mengalami kesulitan likuiditas maka bank tersebut dapat menyidiki sebagian portofolio kreditnya kepada bank lain untuk mengatasi masalah tersebut.

4. Cadangan likuiditas Khususnya bank yang tidak dapat segera memperoleh dana pada saat diperlukan, bank tersebut biasanya membentuk cadangan likuiditas. Cadangan likuiditas biasanya dibentuk dengan cara memelihara saldo Kas dan Giro BI pada batas maksimal yang diperbolehkan.
5. Sumber dana yang sifatnya Last Resort salah satu sumber likuiditas yang sifatnya last resort, yang umum digunakan oleh kebanyakan bank adalah fasilitas line of credit dari bank lain. Bank yang menjalin hubungan koresponden dengan bank lain kemungkinan dapat meminta fasilitas stand by line of credit dari bank korespondennya tersebut. Selain itu, Bank Sentral bertindak sebagai leader of last resort untuk dunia perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. Namun bantuan dana dari bank sentral biasanya baru akan dimanfaatkan oleh bank yang kesulitan likuiditas apabila sumber-sumber likuiditas lainnya tidak cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialaminya.

Jika dilakukan klasifikasi jenis alat likuid menurut pos pembukuan dalam neraca, alat likuid yang dimasukkan kedalam pos-pos tertentu ini adalah saldo masing-masing jenis alat likuid pada tanggal terakhir pada masa laporan likuiditas. Dalam hal ini, jenis alat likuid dimasukkan pada pos-pos aktiva, sedangkan kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga yang harus ditutup dengan

alat likuid tersebut dimasukkan pada pos-pos pasiva. Klasifikasi masing-masing pos tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Aktiva, terdiri dari kas, Bank Indonesia yaitu semua simpanan/tagihan bank bersangkutan dalam Rupiah kepada Bank Indonesia seperti saldo giro BI dan lainnya, surat-surat berharga dan tagihan lainnya, antar bank aktiva, kredit yang diberikan.
- b. Pasiva terdiri dari giro, simpanan berjangka, tabungan, antar bank pasiva, kewajiban lainnya yang segera jatuh tempo, yaitu semua kewajiban dalam rupiah yang setiap dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar, misalnya kiriman uang.

2.2.4.2 Alat Ukur Likuiditas

Menurut Dendawijaya (2005:114-117) alat ukur rasio likuiditas yang dipergunakan dalam menilai likuiditas bank antara lain sebagai berikut:

a. *Cash Ratio*

Merupakan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank yang harus segera dibayar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. Besarnya *cash ratio* adalah 5%. *Cash Ratio* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{alat likuid}}{\text{pinjaman yang harus segera dibayar}} \times 100\%$$

Pengertian alat likuid dalam rasio di atas terdiri dari dua hal sebagai berikut:

- 1) Aktiva, terdiri dari kas, Bank Indonesia yaitu semua simpanan/tagihan bank bersangkutan dalam Rupiah kepada Bank Indonesia seperti saldo

giro BI dan lainnya, surat-surat berharga dan tagihan lainnya, antar bank aktiva, kredit yang diberikan.

- 2) Pasiva terdiri dari giro, simpanan berjangka, tabungan, antar bank pasiva, kewajiban lainnya yang segera jatuh tempo, yaitu semua kewajiban dalam rupiah yang setiap dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar, misalnya kiriman uang.

b. *Loan to Deposit Ratio*

LDR digunakan untuk menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank, yaitu kemampuan bank dalam menghimpun dana tabungan dari masyarakat dan kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menurut surat edaran BI No. 12/19/PBI/2010 pasal 10 menetapkan bahwa batas bawah LDR target sebesar 78% dan batas atas LDR target 100%. Formula untuk menghitung LDR adalah sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{jumlah kredit yang diberikan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, termasuk dalam pengertian dana yang diterima bank adalah sebagai berikut:

Menurut Margaretha (2007:63), di sisi lain rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tabungan yang sudah dijadikan produk kredit baru. Rasio ini juga seingkali digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan keuangan dalam menilai kesehatannya.

c. *Loan to Asset Ratio*

Rasio digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh bank. Rumus yang digunakan adalah:

$$LAR = \frac{\text{total kredit yang diberikan}}{\text{jumlah aset}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditasnya semakin kecil karena jumlah aset yang digunakan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar.

d. *Net Performing Loan*

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 NPL digunakan untuk mengukur kualitas suatu kredit. Jika rasio ini semakin kecil maka tingkat likuiditas bank dikatakan cukup baik. NPL yang baik adalah $\leq 5\%$. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung NPL adalah:

$$NPL = \frac{\text{total kredit bermasalah}}{\text{total kredit yang disalurkan}} \times 100\%$$

Menurut Riyadi (2006:20) Tingkat risiko kredit diproksikan dengan NPL karena NPL dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Apabila tingkat NPL melebihi batas maksimum 5%, maka bank tersebut dalam keadaan yang tidak sehat.

2.2.4.3 Prinsip-prinsip Pengelolaan Likuiditas

Menurut Chairuddin (2002:4) dalam pengelolaan likuiditas bank perlu diperhatikan beberapa prinsip pengelolaan likuiditas yaitu:

- a. Bank harus memiliki sumber dana inti (*core source of fund*) yang sesuai dengan dengan sifat bank yang bersangkutan maupun pasar uang dan sumber dana yang ada dimasyarakat, serta yang cocok pula dengan mekanisme pengumpulan dana yang berlaku ditempat bank tersebut berada.
- b. Bank harus mengelola sumber-sumber dana maupun penempatan dengan hati-hati. Oleh karena itu harus diperhatikan komposisi sumber dana jatuh waktu berdasarkan jumlah masing-masing komposisi, tingkat suku bunga, faktor-faktor kesulitan dalam pengumpulan dana, produk-produk dana yang dimiliki dan sebagainya.
- c. Bank harus diperhatikan *different price for different customer* didalam penempatan dananya. Dan *price* (tingkat suku bunga) tersebut harus diatas tingkat suku bunga dana yang dipakainya, atau dengan kata lain, tingkat suku bunga atas penempatan dana tersebut harus bersifat floating.
- d. Bank harus menaruh perhatian terhadap umur sumber dananya kapan akan jatuh waktu, jangan sampai terjadi maturity gap dengan penempatannya (placement). Oleh karena itu perlu diperhatikan prinsip pemenuhan kebutuhan dana yang sering menjadi acuan, yaitu:
 - 1) Kebutuhan dana jangka pendek harus dipenuhi dengan sumber-sumber dana jangka pendek.
 - 2) Kebutuhan dana jangka panjang harus dipenuhi dengan sumber-sumber dana jangka panjang.
- e. Bank harus waspada bahwa tingkat suku bunga dana tersebut selalu berfluktuasi, naik turun dengan gerak yang sukar ditebak sebelumnya

(volatile). Oleh karena itu, agar bank tidak kehilangan sumber dananya karena nasabah pindah ke bank lain maka bank harus memiliki pricing policy yang baik, disamping harus mempunyai marketing strategy yang minimal mencakup strategi dibidang:

- a. Product Quality
 - b. Product Placement
 - c. Promotion
 - d. Product Pricing
 - e. Power
 - f. Public Relation.
- f. Bank harus secara terkoordinasikan apabila akan menanamkan sumber-sumber dananya keaktiva. Sesuai ketentuan perbankan yang ada saat ini, ekspansi aktiva suatu bank akan dibatasi oleh faktor-faktor:
- 1) Aktiva tertimbang menurut risiko (Risk Weighted Asset).
 - 2) Capital Adequanty Ratio (CAR)
 - 3) Net Open Position (NOP)
 - 4) Loan to Deposit Ratio (LDR)
 - 5) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit.
 - 6) Persentase Kredit Usaha Kecil (KUK) harus lebih besar dari 20%.

2.2.4.4 Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Likuiditas.

Menurut Chairuddin (2002:5) Pengelolaan likuiditas merupakan faktor yang sangat penting dalam operasional perbankan, bahkan sangat menentukan bagi kemampuan suatu nak untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan

usaha yang makin kompetitif. Tujuan dan manfaat dari pengelolaan likuiditas suatu bank secara garis besar adalah :

- a. Untuk menurunkan serendah mungkin biaya dana, hal ini dapat dilakukan dengan cara memilih komposisi sumber dana yang akan memberikan biaya yang paling rendah. Beberapa alternatif yang tersedia adalah :
 - 1) Dari dalam negeri versus dana luar negeri, atau dana rupiah versus dana valuta asing.
 - 2) Dana-dana jangka pendek versus dana-dana jangka panjang, atau dana dari pasar uang (money market) versus obligasi ataupun deposito jangka panjang.
 - 3) Dana sendiri (modal) versus dan dari pihak ketiga, atau dana dengan biaya deviden versus dana dengan biaya bunga.
- b. Untuk memenuhi ketentuan sumber dana yang diperlukan bank di dalam pemberian kredit, penanaman dana dalam valuta asing, penanaman dana dalam surat-surat berharga, dan penanaman dana dalam aktiva tetap maupun untuk memenuhi kebutuhan modal sehari-hari.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan otoritas moneter (bank sentral) di dalam menjaga likuiditas minimum, misalnya untuk memenuhi *legal reserve requirement*, dan untuk memenuhi standar loan to deposit ratio yang sehat.

2.2.4.5 Strategi Mempertahankan Likuiditas PT. BPR Batu Artorejo

Sangatlah penting bagi suatu bank untuk menjaga keadaan likuiditasnya agar selalu stabil dan dalam keadaan yang selalu baik. Apabila likuiditas suatu

bank mengalami penurunan, maka akan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kinerja bank tersebut. Dalam prakteknya, banyak cara yang dilakukan oleh bank untuk mempertahankan atau menjaga keadaan likuiditas agar tetap dalam keadaan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ichwanul Ridwan, yaitu selaku Direktur Umum PT. BPR Batu Artorejo, strategi yang dilakukan oleh PT. BPR Batu Artorejo dalam mempertahankan atau menjaga keadaan likuiditasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga rasio kas harus 5% atau diatas 5%. Dalam mengidentifikasi rasio ini, dapat dilihat melalui posisi gap atau keseimbangan arus kas, yaitu arus kas keluar lebih besar dari arus kas yang masuk. Berdasarkan PBI No. 7/34/PBI/2005 tentang tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus, likuiditas rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 3% maka dinyatakan dalam pengawasan khusus. Apabila tidak ada perbaikan selama 6 bulan, maka risikonya adalah BPR tersebut akan ditutup.
- b. Aktif mengukur posisi likuiditas BPR terhadap kewajiban segera yang harus dibayar dan pemenuhan kewajiban dana pihak ketiga.
- c. Apabila dilihat dari segi alasan terjadinya penurunan likuiditas yang disebabkan oleh tingginya tingkat NPL, maka yang dilakukan BPR adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyelesaikan Kredit bermasalah dengan melakukan penagihan secara ekstensif kepada para debitur.

- 2) Apabila kredit macet disebabkan karena gagal panen (bagi petani), maka akan dilakukan perpanjangan pembayaran kredit.
- 3) Meningkatkan penyaluran kredit secara selektif.
- 4) Apabila ketiga hal diatas sudah dilakukan oleh BPR tetapi debitur masih sulit untuk membayar tagihan (debitur yang sengaja tidak mau membayar tagihan tepat waktu hingga batas waktu yang ditentukan), maka akan dilakukan penarikan agunan (jaminan) oleh BPR yang kemudian akan dilelang untuk menambah jumlah rasio kas.

d. Melakukan pinjaman antar bank dengan jangka waktu 3 bulan.

2.2.5 Kredit Dalam Pandangan Islam

Kredit dalam islam dikenal dengan istilah *qard* yang artinya adalah suatu transaksi atau perikatan antara pihak kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) berupa uang atau barang yang merupakan suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjam dengan maksud akan mengembalikan yang semisal sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, misalnya satu minggu, satu bulan, enam bulan atau satu tahun. Ayat al-Qur'an yang mendasari kredit yaitu Surat al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245)

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan". (QS. Al-Baqarah: 245)

Rasulullah SAW juga bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah no. 2430, dari Ibnu Mas’ud)

2.2.5.1 Analisis kredit

Kredit yang diberikan kepada masyarakat harus dianalisis terlebih dahulu, bagaimana wataknya, apakah dia orang yang jujur atau tidak. Dalam analisis ini diperlukan analisis dari karakter orang yang akan mengajukan permohonan kredit, bank harus menganalisis tentang karakter calon nasabah tersebut, salah satunya adalah orang tersebut harus jujur, seperti firman Allah SWT dalam Surat Al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26)

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al-Qashas:26)

Ayat diatas menjelaskan bahwa bila terdapat seorang pedagang yang jujur, maka banyak pedagang lain yang bersedia bekerja sama, dengan menitipkan barang di tokonya dan dibayar setela barang itu laku. Atau juga meminjamkan modal untuk mengembangkan usahanya dengan sistem yang tidak bertentangan dengan syariah.

Selain keuntungan diatas, Allah juga mengingatkan hal tersebut dalam firmanNya pada Surat al-Infithaar ayat 13-14:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14)

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka”. (QS. Al-Infithaar: 13-14)

Ayat diatas menjelaskan bahwa pedagang yang jujur mendapatkan dua keuntungan sekaligus, dalam usaha dan kehidupan akhirat. Sebaliknya jika kepercayaan terhadap lembaga maupun pribadi dari pedagang lain hilang. Rasulullah juga merupakan seorang pedagang yang ulung. Dengan modal kejujurannya, sehingga ia diberi gelar al-Amin (orang yang dapat dipercaya). Sehingga berhasil memajukan bisnis Siti Khadijah.

2.2.5.2 Jangka waktu pembayaran

Memberi tangguh atau memberi jangka tempo baru pembayaran sampai pihak debitur bisa membayarnya dan bersikap ramah terhadap debitur juga sangat dianjurkan dalam islam. Seperti firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)

“Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian dari semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang berada dalam situasi yang sulit dalam membayar hutangnya maka berilah tangguhan sampai orang yang berhutang tersebut lapang.

2.2.5.3 Pengawasan kredit

Pengawasan kredit dilakukan secara holistic, yaitu pengawasan secara menyeluruh segala aspek, baik itu pengawasan debitur, kreditur dan terlebih lagi

pengawasan dari Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat ayah 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِجَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat:6)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan sesuatu sebaiknya harus memeriksa secara teliti dan melakukan pengawasan yang baik. Hal ini dilakukan agar bank dapat mengetahui keadaan nasabah yang sebenarnya sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka bank dapat membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat sehingga tidak sampai merugikan kedua belah pihak (kreditur dan debitur).

2.2.6 Likuiditas Dalam Pandangan Islam

Menurut Departemen Agama RI 2006:156) likuiditas merupakan sebuah cara untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dalam jangka waktu dekat. Adapun yang menjadi dasar hutang piutang dapat dilihat pada ketentuan al-Qur'an dan Hadits. Allah berfirman dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah: 2)

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْفَسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

"Barang siapa yang mau diselamatkan Allah dari kesusahan pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan atau membebaskan hutangnya". (HR. Muslim no. 1563)

الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِنْ لَدَيْنَ

"Yang terbunuh di jalan Allah (syahid) akan dihapuskan semua dosanya kecuali hutang." (HR. Muslim no. 1886)

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut dapat dijelaskan bahwa hukum memberi hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan toleransi, namun pada umumnya memberi hutang hukumnya sunnah. Akan tetapi hutang atau pinjaman hukumnya menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi hutang kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat karena ada keluarga yang sakit.

2.3 Kerangka Berpikir

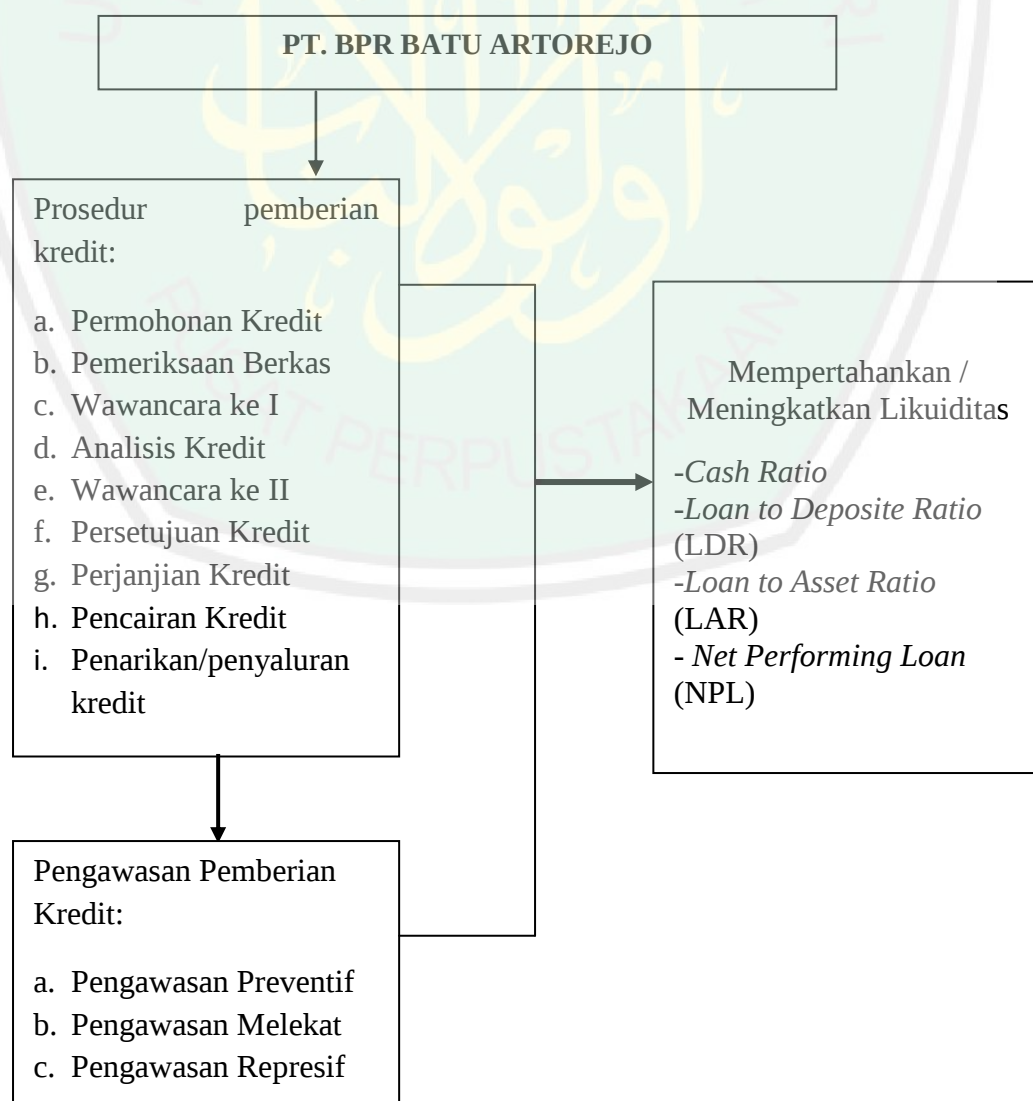
PT. BPR Batu Artorejo yang bergerak di bidang perbankan dituntut harus mampu dalam menjalankan usahanya secara efektif dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Adanya kredit yang diberikan oleh BPR merupakan suatu investasi yang mempunyai resiko yang cukup besar.

BPR yang sebagian besar sumber modalnya berasal dari kredit, dituntut untuk mempertahankan atau bahkan harus dapat mengelola kreditnya dengan baik

serta mengadakan pengawasan yang efektif terutama yang berkaitan dengan kredit BPR dengan memperhatikan resiko-resiko yang ada dan pnantinya dapat meningkatkan dan mempertahankan likuiditas BPR demi kelangsungan hidup BPR tersebut di masa depan. Dengan dilakukannya pengelolaan kredit secara professional diharapkan dapat meningkatkan likuiditas, karena tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kinerja BPR yang tinggi pula.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang diuraikan diatas, maka dapat dijelaskan dengan kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Wirartha (2006:134) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek alami. Penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Sedangkan deskriptif menurut Wirartha (2006:154) adalah penelitian yang menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi atau variabel. Sifatnya hanya sekedar mengungkapkan fakta. Hasil penelitian lebih ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

3.2 Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat suatu penelitian dilakukan. Berkaitan dengan itu, maka penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Batu Artorejo yang terletak di Jl. KH. Agus Salim No. 31, Kecamatan Sisir, Kota Batu Jawa Timur. Objek penelitian ini berkaitan dengan “Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Kredit Untuk Mempertahankan Likuiditas” dan jumlah kredit yang disalurkan dari tahun 2012-2014 selalu mengalami peningkatan.

3.3 Subyek

Menurut Arikunto (2002:107) subyek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Subyek dalam penelitian ini adalah: Pimpinan yaitu Direksi BPR, karyawan kabag kredit, Customer service dan teller, serta tiga orang nasabah PT. BPR Batu Artorejo. Dari subyek tersebut penulis akan mendapatkan informasi mengenai PT. BPR Batu Artorejo mulai dari sejarah, prosedur pelaksanaan dan pengawasan pemberian kredit, persyaratan untuk mengajukan kredit, pendanaan yang dilakukan oleh PT. BPR Batu Artorejo, dan strategi mempertahankan likuiditas PT. BPR Batu Artorejo.

3.4 Data dan Jenis Data

Menurut Arikunto (2002:107) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data-data di peroleh. Penelitian yang dilaksanakan berkaitan erat dengan data yang diperoleh sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran / alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait, yaitu subyek penelitian. Wawancara yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui

bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Batu Artorejo.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian. Data sekunder penulis adalah laporan keuangan PT. BPR Batu Artorejo tahun 2012-2014. Laporan keuangan ini digunakan untuk melihat laporan neraca, laporan arus kas, laporan laba/rugi PT. BPR Batu Artorejo yang kemudian akan digunakan penulis untuk menghitung rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku kepustakaan, majalah-majalah, skripsi, dan jurnal hasil penelitian. Studi pustaka bertujuan untuk mendapatkan teori-teori yang digunakan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan dan pengawasan pemberian kredit untuk mempertahankan likuiditas perusahaan. Kemudian data yang diperoleh penulis dipelajari, dianalisis dan dibandingkan dengan teori-teori yang sudah ada.

b. Metode Interview (Wawancara)

Menurut Arikunto (2007:132) wawancara dibedakan atas:

1) Interview bebas

2) Interview terpimpin

3) Interview bebas terpimpin

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Pimpinan, Karyawan dan nasabah PT. BPR Batu Artorejo. Wawancara yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan pemberian kredit yang diterapkan di PT. BPR Batu Artorejo, melihat keadaan likuiditas serta mengetahui strategi mempertahankan likuiditas yang dilakukan oleh PT. BPR Batu Artorejo.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158) Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya. Dalam dokumen berupa struktur organisasi PT. BPR Batu Artorejo. Dari struktur organisasi tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana pembagian tugas masing-masing karyawan baik tugas mulai dari dewan komisaris hingga tugas para karyawan yang ada di PT. BPR Batu Artorejo.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif deskriptif. Adapun teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur pemberian kredit, pengawasan kredit dan strategi untuk mempertahankan likuiditas.

a. Prosedur pemberian kredit merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum BPR melakukan pencairan kredit kepada debitur. Menurut Kasmir (2007:104) prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

- 1) Permohonan kredit: dilakukan oleh calon debitur yang akan mengajukan kredit dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. BPR Batu Artorejo.
- 2) Pemeriksaan Berkas-berkas: dilakukan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan dan sudah benar.
- 3) Wawancara ke I: penyelidikan kepada calon debitur secara langsung pada saat mengajukan permohonan kredit untuk meyakini kelengkapan berkas sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPR.
- 4) Pemeriksaan lapangan (Analisis kredit): analisis kredit dilakukan setelah permohonan diajukan dengan cara melakukan survey dan pengamatan kepada calon debitur. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dari calon debitur yang nantinya akan menerima kredit dari BPR tersebut.
- 5) Wawancara ke II : kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada yang kekurangan pada saat setelah melakukan analisis kredit.
- 6) Persetujuan kredit: persetujuan kredit ini dilakukan apabila hasil dari analisis kredit yang telah dilakukan oleh BPR menunjukkan bahwa kondisi dari calon debitur sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh

calon debitur melalui permohonan kredit dan dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit.

7) Perjanjian kredit: setelah kredit disetujui oleh BPR, maka harus ada perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak (kreditur dan debitur) di awal persetujuan kredit. Perjanjian tersebut sama seperti perjanjian kredit pada umumnya yang diterapkan oleh BPR.

8) Realisasi kredit (Pencairan kredit): setelah semua berkas disetujui, maka pihak kreditur akan mencairkan kredit melalui rekening nasabah ataupun, memberikannya secara langsung kepada debitur.

b. Pengawasan pemberian kredit: bertujuan untuk memonitoring kredit yang telah dicairkan dan mengawasi perkembangan usaha debitur sehingga bank dapat dengan segera melakukan penanganan yang cepat apabila terjadi kegagalan kredit yang disebabkan karena usaha debitur yang memiliki tanda-tanda takan terjadinya kredit bermasalah. Dalam pelaksanaan pengawasannya terdiri dari:

1) Pengawasan prefentif: Menurut Suhardjono (2004:233) pengawasan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pada setiap tahapan proses pemberian kredit.

2) Pengawasan kredit melekat: Menurut Suhardjono (2004:238) pengawasan ini terdiri dari dua macam, yaitu: *Pertama* pengawasan atasan langsung (PAL) merupakan pengawasan langsung yang melekat pada atasan untuk memastikan setiap bawahan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah diuraikan. *Kedua* sistem pengendalian

manajemen (SPM) merupakan segala usaha untuk mengendalikan, menjamin dan mengarahkan agar setiap tugas serta rencana dapat berjalan sebagaimana mestinya

- 3) Pengawasan represif: Menurut Suhardjono (2004:239) pengawasan ini dilaksanakan dengan cara melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit dan perkembangan usaha debitur setelah mendapatkan kredit dari bank. Pengawasan ini dapat dilakukan secara aktif maupun pasif.

c. Analisis Rasio Likuiditas dan Strategi Mempertahankan Likuiditas

- 1) Analisis Rasio Likuiditas, menurut Dendawijaya (2005:114-117) analisis rasio likuiditas antara lain sebagai berikut:

a) *Cash Ratio*

Merupakan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank yang harus segera dibayar. rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. Besarnya *cash ratio* adalah $\geq 5\%$. *Cash Ratio* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{alat likuid}}{\text{pinjaman yang harus segera dibayar}} \times 100\%$$

Pengertian alat likuid dalam rasio d atas terdiri dari dua hal sebagai berikut: Aktiva, terdiri dari kas, Bank Indonesia yaitu semua simpanan/tagihan bank bersangkutan dalam Rupiah kepada Bank Indonesia seperti saldo giro BI dan lainnya, surat-surat berharga dan tagihan lainnya, antar bank aktiva, kredit yang diberikan. Sedangkan

Pasiva terdiri dari giro, simpanan berjangka, tabungan, antar bank pasiva, kewajiban lainnya yang segera jatuh tempo, yaitu semua kewajiban dalam rupiah yang setiap dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar, misalnya kiriman uang.

b) *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

LDR digunakan untuk menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank, yaitu kemampuan bank dalam menghimpun dana tabungan dari masyarakat dan kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menurut surat edaran BI No. 12/19/PBI/2010 pasal 10 menetapkan bahwa batas bawah LDR target sebesar 78% dan batas atas LDR target 100%. Formula untuk menghitung LDR adalah sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{jumlah kredit yang diberikan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Menurut Margaretha (2007:63), di sisi lain rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tabungan yang sudah dijadikan produk kredit baru. Rasio ini juga seingkali digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan keuangan dalam menilai kesehatannya.

c) *Loan to Asset Ratio*

Rasio digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh bank. Rumus yang digunakan adalah:

$$LAR = \frac{\text{total kredit bermasalah} \times 100\%}{\text{jumlah aset}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditasnya semakin kecil karena jumlah aset yang digunakan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar.

d) *Net Performing Loan (NPL)*

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 NPL digunakan untuk mengukur kualitas suatu kredit. Jika rasio ini semakin kecil maka tingkat likuiditas bank dikatakan cukup baik. NPL yang baik adalah $\leq 5\%$. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung NPL adalah:

$$NPL = \frac{\text{total kredit bermasalah}}{\text{total kredit yang disalurkan}} \times 100\%$$

Menurut Riyadi (2006:20) Tingkat risiko kredit diproksikan dengan NPL karena NPL dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Apabila tingkat NPL melebihi batas maksimum 5%, maka bank tersebut dalam keadaan yang tidak sehat.

2) Analisis Strategi Mempertahankan Likuiditas

Analisis strategi mempertahankan likuiditas yang diterapkan oleh BPR yaitu berdasarkan hasil dari perhitungan rasio-rasio likuiditas yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

a) Hasil perhitungan *Cash Ratio*

- b) Hasil perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)
- c) Hasil perhitungan *Loan to Asset Ratio* (LAR)
- d) Hasil perhitungan *Net Performing Loan* (NPL)



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah PT. BPR Batu Artorejo

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Bank tetapi berbeda dengan Bank Umum lainnya. perbedaan BPR dengan bank umum adalah pada produknya yaitu pada Bank Umum terdapat giro sedangkan pada BPR tidak terdapat giro.

PT. BPR Batu Artorejo merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang Perbankan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. PT. BPR Batu Artorejo didirikan di Kota Batu berdasarkan akta No. 10 tanggal 04 Mei 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Titiek Soeryati Soekesi, SH yang telah mendapatkan pengesahan melalui Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Desember 1993 N0. 103, tambahan No. 6163. Anggaran dasar terakhir dibuat dihadapan Notaris Niluh Elita Mahariany, SH., M.Kn. Akta No. 08 tanggal 20 Oktober 2010 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.10-29722.

Kantor pusat PT. BPR Batu Artorejo berada di JL. KH. Agus Salim No. 31 Kota Batu – Jawa Timur berdasarkan Persetujuan Prinsip Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-

263/MK.17/1993 tanggal 16 Maret 1993, Persetujuan Izin Usaha dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No. Kep-125KM.17/1994 tanggal 23 Mei 1994 HO Terakhir No. 530.08/HO/422.208/2010 tanggal 24 November 2010. Pada tanggal 01 Juli 1994 PT. BPR Batu Artorejo mulai beroperasi pada bidang usaha BPR dengan NPWP Perusahaan: 01.524.048.4.628.000/01.524.048.4.651-000. Hingga saat ini PT. BPR Batu Artorejo masih belum memiliki atau membuat kantor cabang.

4.1.2 Visi dan Misi PT. BPR Batu Artorejo

PT. BPR Batu Artorejo didirikan dengan maksud untuk memantapkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian melalui aktivitasnya agar tercapai peningkatan taraf hidup rakyat. Adapun visi dan misi PT. BPR Batu Artorejo adalah sebagai berikut:

a. Visi PT. BPR Batu Artorejo

Menjadi Bank yang terpercaya bagi masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

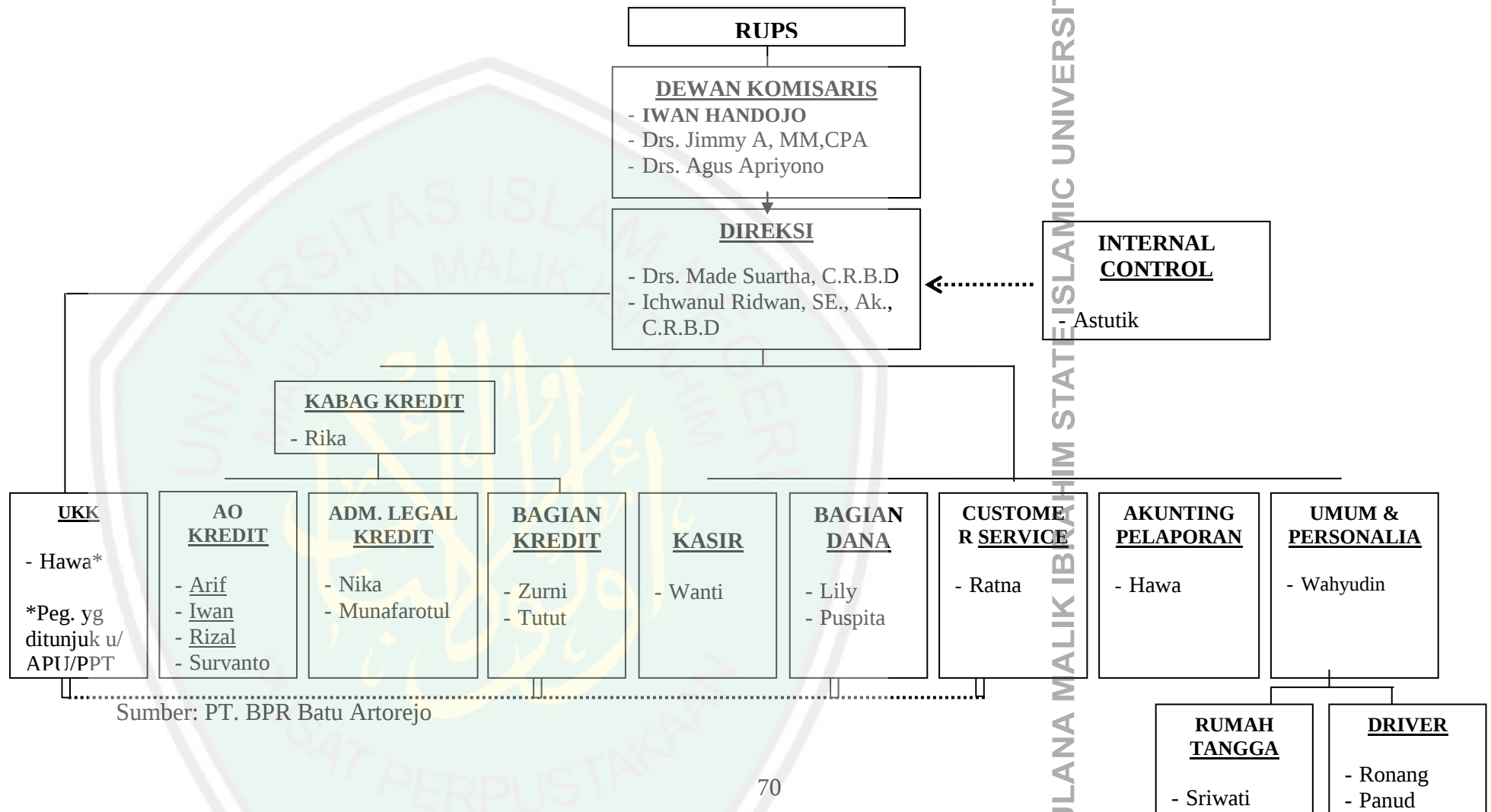
b. Misi PT. BPR Batu Artorejo

- 1) Memiliki suku bunga kredit yang bersaing
- 2) Memiliki suku bunga, tabungan dan deposito yang sesuai dengan LPS.
- 3) Berusaha meningkatkan kesejahteraan karyawan.
- 4) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4.1.3 Struktur Organisasi PT. BPR Batu Artorejo

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain serta bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Dengan struktur organisasi yang baik, maka pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan sehingga efektivitas dan efisiensi kerja dapat terwujud melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Suatu lembaga/instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan maupun kelompok yang bersifat melaksanakan kegiatan tertentu juga mencakup tata hubungan secara vertical melalui saluran tunggal berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) susunan dan tata kerja PT. BPR Batu Artorejo adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. BPR Batu Artorejo



4.1.4 Job Description Struktur Organisasi PT. BPR Batu Artorejo

Berdasarkan struktur organisasi yang ada dapat dijelaskan fungsi masing-masing bagian struktur organisasi PT. BPR Batu Artorejo adalah sebagai berikut:

a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

- 1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Dalam BPR
- 2) RUPS dilaksanakan untuk menetapkan anggaran dasar; anggaran rumah tangga dan perubahan anggaran dasar; kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha BPR; pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas; menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja BPR serta pengesahan laporan keuangan; pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya; pembagian SHU; penggabungan, peleburan dan pembubaran BPR.

b. Dewan Komisaris

Membawahi : Dewan Direksi

Tugas Pokok :

- 1) Mengawasi, mengevaluasi dan membina pengurusan BPR yang dilakukan direksi.
- 2) Wajib menjaga kerahasiaan BPR.
- 3) Mempunyai komitmen untuk mengembangkan BPR yang sehat.
- 4) Melaksanakan dan mematuhi segala peraturan yang berlaku dikeluarkan oleh Pemerintah dan BI.

- 5) Memberikan persetujuan dan melakukan pengawasan pelaksanaan tanggung jawab direksi atas kebijakan dan prosedur pelaksanaan program APU dan PPT.

c. Dewan Direksi

Membawahi : Seluruh bagian/unit kerja yang berada di perusahaan.

Tugas Pokok :

- 1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam maksud dan tujuan BPR berdasarkan prinsip prudential Banking dengan mematuhi peraturan perundangan, kebijakan-kebijakan dari pemerintah maupun BI dan anggaran dasar perusahaan.
- 2) Menjalankan kebijakan dari komisaris selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah, BI dan anggaran dasar.
- 3) Menjaga kerahasiaan BPR.
- 4) Memimpin RUPS.
- 5) Melaporkan kinerja perusahaan sewaktu-waktu baik secara lisan maupun tertulis diminta atau tanpa diminta kepada dewan Komisaris jika dipandang perlu.

d. *Internal Control*

Atasan langsung : Direksi

Tugas Pokok :

- 1) Memantau/ memastikan kepatuhan terhadap kebijakan SPI.
- 2) Mengidentifikasi risiko yang mungkin tidak terkendali.

- 3) Memantau, menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan “tindak lanjut perbaikan” yang telah dilakukan oleh auditee.

e. Kabag Kredit

Membawahi : Account Officer, Adm. Kredit, Teller Kredit

Tugas Pokok :

- 1) Mengawasi dan mengarahkan bagian angsuran, administrasi kredit dan AO.
- 2) Mengatur kegiatan investigasi atas permohonan fasilitas kredit yang termasuk mengadakan penilaian barang jaminan.
- 3) Memeriksa laporan hasil investigasi atau analisa yuridis dan financial dari AO untuk dapat disetujui.
- 4) Menyiapkan serta mengurus pengikatan kredit.
- 5) Melakukan review atas fasilitas yang diberikan.
- 6) Memonitoring bagian angsuran terhadap seluruh debitur, baik yang bermasalah maupun yang lancar agar dapat segera mengambil tindakan perbaikan terhadap pinjaman non lancar.

f. Account Officer

Atasan langsung : Kabag. Kredit

Tugas Pokok :

- 1) Menerima dan meneliti kelengkapan permohonan calon debitur dan melaksanakan kegiatan survey yang telah diatur oleh kabag. kredit.
- 2) Melakukan analisa ekonomi dan yuridis minimal mencakup penilaian yang berdasarkan analisis 5C.

3) Hasil survey dan analisa didiskusikan dengan kabag. kredit untuk dapat dilanjutkan ke Direksi.

4) Melaksanakan pembinaan dan penyeleksian debitur.

5) Wajib dan berhak menerima data debitur terkini baik lisan maupun tertulis dari bagian agsuran sebagai dasar untuk melakukan kegiatan penagihan ataupun penarikan barang jaminan jika terjadi tunggakan angsuran pinjaman.

6) Melakukan fungsi-fungsi marketing dengan jujur dan beritikad baik memajukan perusahaan.

g. Teller Kredit

Atasan langsung : Kabag. Kredit

Tugas Pokok :

1) Mencatat sebagian data yang diperlukan berkaitan dengan pengeluaran (pencairan) kredit ke dalam kartu angsuran.

2) Menghitung dan membuat bukti angsuran kepada debitur yang mengangsur dan mencatatnya pada kartu angsuran.

3) Membuat laporan mengenai kondite nasabah khususnya di dalam kelancaran pengembalian pinjaman.

4) Membuat surat tagihan kepada nasabah yang menunggak angsurannya dan wajib memberikan data secara lisan maupun tertulis kepada AO agar dapat ditindak lanjuti dengan penagihan atau penarikan jaminan oleh AO.

h. Administrasi Kredit

Atasan langsung : Kabag. Kredit

Tugas Pokok :

- 1) Mengetik perjanjian kredit yang kemudian diserahkan ke Direksi dan debitur untuk ditandatangani.
- 2) Memeriksa ulang kelengkapan debitur termasuk agunan/jaminannya.
- 3) Membuat nota kredit dan memasukkan data base ke komputer.
- 4) Mencatat jenis agunan ke dalam kartu jaminan dan menyimpannya ke dalam vault (lemari penyimpanan barang jaminan).
- 5) Mencatat, mengamankan dan bertanggung jawab penuh atas keluar-masuk barang jaminan.
- 6) Mengarsipkan data nasabah dan surat-surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh debitur dan direksi.
- 7) Menyayani debitur yang melaksanakan perpanjangan STNK.

i. Kasir

Atasan langsung : Direksi

Tugas Pokok :

- 1) Melakukan penerimaan uang tunai dan melaksanakan pembayaran terhadap segala pengeluaran kas yang telah disetujui Direksi.
- 2) Bertanggung jawab atas kehilangan uang tunai di kasir.
- 3) Bertanggung jawab atas titipan bilyet giro, cek, buku bank lain dan bilyet deposito.
- 4) Membuat pembukuan kas masuk-keluar, laporan mutasi kas dan rekonsiliasi bank termasuk melakukan penyetoran maupun penarikan atas bank lain milik BPR atas persetujuan Direksi.

5) Menghitung dan mencocokkan jumlah yang ada dicatatan dalam daftar mutasi dengan dana yang ada.

j. Akuntansi dan Pelaporan

Atasan langsung : Direksi

Tugas Pokok :

- 1) Mencatat dan memeriksa kebenaran setiap transaksi harian (posting slip-slip pembukuan) ke dalam buku jurnal harian dan buku-buku pembantu.
- 2) Bertanggung jawab penuh atas pencatatan yang telah dilakukan dengan mematuhi pertauran-peraturan yang telah ditetapkan BPR maupun dari SAK yang berlaku.
- 3) Mengevaluir program-program computer terutama apabila menemukan kesalahan program.
- 4) Turut membantu melayani pemeriksaan internal/eksternal audit yang dilaksanakan oleh BI dan atau petugas pajak.

k. Administrasi Dana

Atasan langsung : Direksi

Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan dan melayani masyarakat penabung dan Deposan termasuk calon nasabah.
- 2) Memberikan informasi serta melayani nasabah dalam urusan pembukuan, perhitungan bunga, pengambilan serta penutupan dari tabungan dna deposito untuk administrasi.

- 3) Menerima setoran dan membayarkan kepada nasabah yang menarik uangnya dari BPR berupa tabungan dan atau deposito jika melakukan pelayanan nasabah dengan sistem jemput bola.
- 4) Mencatat dan merekap mutasi tabungan dan depositoo beserta bunganya dan tanggal jatuh temponya (bagi deposito), dan membbuat segala bentuk laporannya (untuk tabungan dibuat setiap hari).
- 5) Membuat kartu-kartu pembantu yang dibutuhkan termasuk menyiapkan blangko permohonan calon penabung/deposan, buku tabungan atau bilyet deposito, dan kartu contoh tanda tangan.
- 6) Bertanggung jawab penuh terrhadap penggarsipan data nasabah baik yang masih berlaku maupun tidak.

1. Bagian Umum dan Personalia

Atasan langsung : Direksi

Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan membuat, mencatat, mengirimkan dan menyimpan surat-surat termasuk menerima surat dari luar.
- 2) Membantu kegiatan operasional perusahaan dalam membeli dan mengadminstrasikan persediaan barang cetak dan perlengkapan operasional kantor lainnya.
- 3) Mencatat data karyawan dan mengarsipkannya termasuk memeriksa kehadiran karryawan setiap hari.
- 4) Diperbantukan untuk *front office* untuk melayani calon nasabah.

- 5) Membagikan uang makan dan transport staff.karyawan berdasarkan tingkat kehadiran karyawan.

m. Customer Service

Atasan langsung : Direksi

Tugas Pokok :

- 1) Memahami spesifikasi produk bank yang ada.
- 2) Melakukan pelayanan prima terhadap semua calon nasabah tanpa kecuali.
- 3) Memelihara kecukupan aplikasi permohonan pengajuan kredit, pembukaan rekening maupun deposito.
- 4) Memahami peraturan APU dan PPT
- 5) Menjalin kerjasama yang baik dengan bagian yang berkaitan dengan produk BPR yang ditangani.

n. Unit Kerja Khusus (UKK)

Atasan langsung : Direksi

Tugas Pokok :

- 1) Memastikan kebijakan APU dan PPT dijalankan sesuai ketentuan.
- 2) Memastikan seluruh laporan LTKM dan laporan lainnya dikerjakan sesuai dengan ketentuan secara baik dan benar.
- 3) Berperan selaku petugas penghubung antara BPR dengan BI, PPATK, dan instansi lainnya terkait APU dan PPAT
- 4) Penyimpanan dokumen sesuai ketentuan.

o. *Driver*

- 1) Melakukan tugas kedinasan berkaitan dengan pelayanan antar jemput Direksi dan karyawan serta pengiriman surat atau barang yang berkaitan dengan urusan BPR.
- 2) Merawat dan memahami dengan baik seluruh kendaraan roda 4 milik BPR.
- 3) Bertanggung jawab penuh atas keselamatan penumpang dan mobil yang dibawanya.
- 4) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direksi sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas urusan BPR.

p. *Cleaning Service*

- 1) Bertanggung jawab atas kebersihan dan perawatan tanaman kantor.
- 2) Melayani pembuatan minuman dan pembelian makan siang untuk dari uang titipan karyawan dan Direksi.
- 3) Belanja untuk kebutuhan/perlengkapan kebersihan dan dapur kantor.
- 4) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direksi sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas urusan BPR.

4.1.5 Susunan Kepengurusan PT. BPR Batu Artorejo

Pengurus Perseroan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. BPR Batu Artorejo No. 12 tertanggal 02 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Niluh Mahariany, SE., M.Kn. dengan ini susunan pengurus perseroan sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

- 1) Komisaris Utama : Iwan Handojo (Lim Wan Tjian)
- 2) Komisaris : Drs. Jimmy Andrianus, MM., CPA

b. Direksi

- 1) Direktur Utama : Drs. Made Suartha, C.R.B.D
- 2) Direktur Perseroan : Ichwanul Ridwan, SE., Ak., C.R.B.D.

Adapun kepemilikan saham PT. BPR Batu Artorejo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kepemilikan Saham PT. BPR Batu Artorejo

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase
1.	Iwan Handojo	Komisaris Utama	580.000	40%
2.	Effendy Minto	-	435.000	30%
3.	Drs. Jimmy Andrianus, MM., CPA	Komisaris	435.000	30%
TOTAL			1.450.000	100%

Keseluruhan pemegang saham diatas merupakan pemegang saham pengendali(PSP) serta tidak ada pemegang saham *Ultimate Shareholder*.

4.1.6 Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja)

a. Jumlah Karyawan

PT. BPR Batu Artorejo mempekerjakan karyawan sebanyak 20 orang karyawan. Adapun susunan personalianya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Tenaga Kerja PT. BPR Batu Artorejo

JABATAN	Jumlah	Pendidikan	Jenis Kelamin (L/P)
Internal Control	1	SMU	P
Pembukuan + UKK	2	SMU	P
Angsuran	2	SMU / D3	P
Account Officer	4	1 S1 / 3 SMU	3L / 1P

Tabungan/Deposito	2	SMU / D3	P
Administrasi Kredit	3	SMU	P
Customer Service	1	SMU	L
Bagian Umum	1	STM	L
Kasir	1	SMU	P
Driver	2	SMU	2L
RT Kantor	1	SMU	P
Jumlah	20		7L / 13P

Sumber: PT. BPR Batu Artorejo, Tahun 2015

b. Jam Kerja Karyawan

Jam kerja yang berlaku pada PT. BPR Batu Artorejo adalah sebagai berikut:

- 1) Hari senin – jum'at : 08.00-16.00 WIB (8 jam kerja selama sehari)
Istirahat : 12.00-13.00 WIB
- 2) Hari sabtu : 08.00-12.00 WIB (setengah hari dari jam kerja Aktif.

4.1.7 Jenis Usaha PT. BPR Batu Artorejo

a. Simpanan (Tabungan)

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan (tabungan) untuk menunjang kegiatan pelayanan operasional BPR yang kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Adapun ketentuan dari tabungan di PT. BPR Batu Artorejo adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi nasabah di PT. BPR Batu Artorejo
- 2) Kemudian PT. BPR Batu Artorejo menerbitkan Buku Tabungan atas nama nasabah sebagai bukti tabungan.

3) Apabila terdapat perbedaan antara saldo di Buku Tabungan dengan yang ada di pembukuan BPR, maka yang digunakan sebagai acuan adalah dari pembukuan BPR.

4) BPR dibebaskan dari segala kerugian yang timbul karena kehilangan atau aibat dari penyalahgunaan Buku Tabungan.

a. Deposito

Deposito yang diberikan oleh PT. BPR Batu Artorejo adalah deposito berjangka. Dengan ketentuan sebagai berikut: setoran deposito antara Rp. 1000.000,- sampai dengan Rp. 2000.000.000,- tiap nasabah. Jangka waktu deposito yang diberikan adalah: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan. Bunga yang dikenakan bersifat fluktuatif (berubah-ubah) bergantung pada keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

b. Kredit

Salah satu fungsi dari bank adalah menyalurkan dana kepada nasabah berupa kredit. Adapun jenis kredit yang diberikan adalah:

1) Pinjaman Tetap Angsuran

Pinjaman yang diberikan dengan pembayaran angsuran wajib tiap bulan, yaitu angsuran pokok ditambah dengan bunga. Bunga yang dikenakan ada 2 macam yaitu bunga flat/tetap (1,75% tiap bulan) dan effective/menurun (2,74% tiap bulan). Jangka waktu yang diberikan antara 6 bulan sampai 24 bulan dengan menyertakan jaminan bisa berupa BPKB atau Sertifikat Hak Milik. Apabila dari 3 hari dari tanggal angsuran tidak membayar angsuran, maka akan dikenakan denda.

Sasaran kredit ini ditujukan kepada pegawai negeri seperti Swasta, PNS, TNI, POLRI dan lain sebagainya dengan catatan adalah pegawai tetap.

Syarat kredit PTA (untuk Swasta) :

- a) Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/paspor)
- b) Fotocopy kartu keluarga (KK)
- c) Fotocopy slip gaji atau SK akta perusahaan
- d) Fotocopy NPWP (untuk pinjaman $\geq 50.000.000,-$,
- e) keterangan domisili perusahaan,
- f) Fotocopy surat nikah, pasphoto 3 lembar ukuran 2x3,
- g) Menyertakan jaminan berupa BPKP, surat tanah, setifikat hak milik, sertifikat rumah dll.

2) Pinjaman Bayar Bunga (Kredit Musiman)

Pinjaman yang diberikan dengan pembayaran angsuran tiap bulan adalah mengangsur bunga saja, sedangkan pokok dibayarkan bebas sampai jangka waktu yang diberikan/saat jatuh tempo. Pinjaman pokok dapat dibayar dengan cara dicicil. Untuk jangka waktu kredit ini adalah 6 bulan dan bunga yang dikenakan sebesar 2,75% effective/menurun tiap bulan. Jaminan yang disertakan adalah BPKB atau Surat Hak Milik. Sama halnya dengan kredit PTA, apabila pada tanggal angsuran tidak membayar, maka akan dikenakan denda. Sasaran kredit ini ditujukan kepada petani, pedagang, kontraktor dan lain sebagainya. Syarat kredit musiman:

- a) fotocopy identitas diri (KTP/SIM/paspor)

- b) fotocopy kartu keluarga (KK)
- c) fotocopy surat nikah,
- d) pasphoto 3 lembar ukuran 2x3,
- e) laporan berkala hasil panen yang ditulis oleh calon debitur
- f) menyertakan jaminan berupa BPKP, surat tanah, setifikat hak milik, sertifikat rumah dll.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Prosedur dan Pengawasan Pemberian Kredit PT. BPR Batu Artorejo

4.2.1.1 Prosedur Pemberian Kredit PT. BPR Batu Artorejo

Prosedur pemberian kredit merupakan serangkaian proses untuk mendapatkan informasi lengkap dan menyeluruh tentang calon debitur sebelum proses pencairan dilakukan. Sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat risiko yang nantinya akan dihadapi oleh BPR. Prinsip pemberian kredit pada PT. BPR Batu Artorejo ini adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana melalui beberapa tahapan sebelum memperoleh kredit. Pihak BPR juga memperhatikan prinsip 5C yang berkaitan dengan *character*, *capacity*, *capital*, *condition* dan *collateral* serta beberapa faktor lainnya yang terkait dengan pemberian kredit tersebut. Prosedur pemberian kredit yang diterapkan pada PT. BPR Batu Artorejo adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Kredit

Permohonan kredit ini merupakan tahapan paling awal yang harus dilakukan oleh calon nasabah/debitur dengan membawa persyaratan yang telah

ditentukan oleh Bank yang akan dituju. Dalam pelaksanaannya, calon debitur harus melakukan hal berikut ini:

- 1) Calon debitur yang menginginkan pinjaman kredit PTA dan kredit musiman harus menghubungi bagian administrasi kredit terlebih dahulu untuk mengetahui tentang persyaratan yang harus dipenuhi serta menyerahkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BPR.
- 2) Calon debitur melakukan pendaftaran di kantor PT. BPR Batu Artorejo dengan mengisi formulir pengajuan kredit yang telah disediakan dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan yang dibawa calon debitur kepada Customer service.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lathifatul Choiriyah, SE selaku debitur di PT. BPR Batu Artorejo pada tanggal 11 Oktober 2016 sebagai berikut:

“Pada saat mengajukan permohonan kredit untuk kredit PTA, beliau diminta untuk membawa persyaratan sebagai berikut: fotocopy identitas diri (KTP/SIM/paspor), fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy slip gaji atau SK akta perusahaan, fotocopy NPWP, keterangan domisili perusahaan, fotocopy surat nikah, pasphoto 3 lembar ukuran 2x3, menyertakan jaminan berupa BPKP, surat tanah, sertifikat hak milik, sertifikat rumah dll.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Soenyoto selaku debitur di PT. BPR Batu Artorejo pada tanggal 17 Oktober 2016 sebagai berikut:

“Pada saat mengajukan permohonan kredit kredit musiman, beliau diminta untuk membawa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut: fotocopy identitas diri, fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy surat nikah, pasphoto 3 lembar ukuran 2x3, laporan berkala mengenai hasil panen yang telah dicatat oleh debitur, menyertakan jaminan berupa BPKP, surat tanah, sertifikat hak milik, sertifikat rumah dll.”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa, pada saat mengajukan kredit, calon debitur diwajibkan untuk memenuhi semua persyaratan diatas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan dan hal-hal yang berhubungan dengan perkreditan. Apabila berkas-berkas calon debitur kurang lengkap maka calon debitur diminta untuk melengkapi kekurangan tersebut, namun jika sampai batas waktu yang ditentukan debitur tidak mampu melengkapinya maka permohonan kredit tidak akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

Selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan kepada bagian Account Officer yang kemudian akan meneliti kelengkapan berkas-berkas tersebut. Kemudian Account Officer akan menjelaskan secara jelas dan terperinci segala hal yang menyangkut ketentuan kredit yang diajukan kepada calon debitur serta melakukan wawancara untuk mengetahui informasi dan data terkini calon debitur. Penjelasan-penjelasan kepada calon debitur meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Keperluan atau tujuan penggunaan kredit
 - b) Besarnya kredit dan jangka waktunya
 - c) Besarnya tingkat suku bunga kredit
 - d) Agunan/jaminan yang akan disertakan oleh nasabah
 - e) Ketentuan asuransi jiwa bagi nasabah PT. BPR Batu Artorejo
 - f) Dan lain-lainnya yang dianggap perlu
- 3) Setelah menjelaskan hal-hal tersebut, AO kemudian meminta calon nasabah untuk mengajukan perkiraan besarnya permohonan kredit beserta jangka

waktu yang diinginkan. Untuk kredit PTA jangka waktu yang diberikan antara 6 bulan sampai 24 bulan sedangkan untuk kredit musiman jangka waktu yang diberikan 6 bulan.

- 4) Selanjutnya calon nasabah harus mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran permintaan kredit, mengisi formulir tanda bukti pemilikan agunan yang dibuat rangkap 2 asli untuk calon nasabah dan sebagai arsip di PT. BPR Batu Artorejo. Setelah keseluruhan hal tersebut dilaksanakan, maka AO akan menyiapkan berkas dalam satu map untuk tahapan berikutnya yaitu melaksanakan kegiatan survei/investigasi yang telah diatur oleh Kepala Bagian Kredit.

b. Analisis Kredit

Setelah permohonan kredit diterima oleh bank, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan surat keterangan permohonan kredit calon nasabah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis kredit (pemeriksaan kredit) calon nasabah berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan dalam bank dan biasanya tergantung pada jenis kredit yang diajukan. Prinsip yang digunakan oleh PT. BPR Batu Artorejo adalah analisis 5C sebagai pedoman dalam melakukan analisis kreditnya yang meliputi *character*, *capital*, *capacity*, *condition of economy*, dan *collateral*.
- 2) AO melakukan survey/pemeriksaan ditempat calon nasabah. Biasanya pada saat melakukan survey, calon debitur tidak akan diberitahu untuk melihat secara langsung kondisi calon debitur. Survey dapat dilakukan dengan

mewawancarai warga disekitar tempat tinggal calon nasabah untuk mengetahui kondisi sebenarnya apakah sesuai dengan yang disampaikan calon nasabah pada bank saat mengajukan permohonan kredit. Namun setelah survey dilakukan, pihak BPR terkadang tidak melakukan wawancara lagi untuk melihat kesesuaian dan kebenaran antara hasil survey dilapangan dan wawancara pada saat calon debitur mengajukan permohonan ketika AO sudah mengetahui tentang kebenaran dari jaminan yang disertakan oleh calon debitur.

3) Penilaian Agunan/Jaminan Kredit

Agunan merupakan perlindungan terhadap setiap pemberian fasilitas kredit dengan nilai minimal setara dengan kredit yang diberikan. Pihak bank harus mengecek agunan yang disertakan oleh calon debitur apakah agunan tersebut adalah milik calon debitur atau bukan. Sehingga bank nantinya tidak akan mengalami masalah ketika pelunasan kredit dilakukan. Dengan demikian apabila nasabah tidak dapat melunasi kreditnya, maka Bank dapat mengambil alih agunan tersebut yang kemudian akan dilelang untuk menutup kredit yang telah diberikan kepada nasabah.

4) Membuat laporan hasil pemeriksaan dilapangan. Setelah diadakan peninjauan lokasi, maka AO akan menyusun laporan yang meliputi hasil analisa kredit, laporan hasil kunjungan, laporan hasil peninjauan agunan dan laporan tentang kondisi keuangan calon debitur sebagai rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemrakarsa kredit.

Penelitian ini juga didukung sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26)

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al-Qashas:26)

Ayat diatas menjelaskan bahwa bila terdapat seorang pedagang yang jujur, maka banyak pedagang lain yang bersedia bekerja sama, dengan menitipkan barang di tokonya dan dibayar setela barang itu laku. Atau juga meminjamkan modal untuk mengembangkan usahanya dengan sistem yang tidak bertentangan dengan syariah.

c. Persetujuan Kredit

Setelah melakukan analisis kredit, maka akan dibuat keputusan apakah kredit tersebut akan ditolak atau diterima. Jika permohonan kredit diterima, maka akan disiapkan administrasinya dengan mengisi aplikasi/formulir dan jika ditolak akan diberitahukan kepada calon debitur secara tertulis. Keputusan kredit ini mencakup jumlah uang yang akan diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar dan waktu pencairan kredit.

d. Perjanjian Kredit.

Sebelum kredit dapat dicairkan maka calon debitur menandatangani perjanjian kredit yang formulirnya telah disediakan oleh BPR, yang isi dan bentuknya telah dipersiapkan dan dicetak terlebih dahulu oleh bagian administrasi kredit. Selain formulir perjanjian kredit, juga telah disiapkan perjanjian ikatan yang merupakan perjanjian pengikat barang jaminan dan surat kuasa pengalihannya.

Perjanjian kredit tersebut dilakukan di depan notaris. Sebagai seorang muslim kita tidak boleh mengingkari sesuatu dari apa yang kita perbuat termasuk dalam hal pemenuhan janji. Karena hal tersebut melibatkan kesepakatan antara seseorang atau lebih untuk melakukan perbuatan tertentu. Salah satu ajaran dalam Al-Qur'an paling penting dalam pemenuhan janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati semua kontrak dan janji, serta memenuhi kewajiban sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
كَانَ مَسْئُولًا (34)

Artinya: “ Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”

Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa Al-Qur'an menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui.

e. Pencairan Kredit

Setelah penandatanganan syarat-syarat yang diperlukan, maka debitur dapat merealisasikan kredit dengan membuka rekening di BPR melalui bagian teller kredit yang telah menerima slip penarikan kredit kemudian mengeluarkan sejumlah uang yang tertera pada slip penarikan kredit berikut bukti penarikan kredit.

Menurut Kasmir (2007;113) prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: permohonan kredit, pemeriksaan berkas-berkas, wawancara ke I, pemeriksaan lapangan (analisis kredit), wawancara ke II, keputusan kredit, perjanjian kredit, realisasi (pencairan kredit), dan

penarikan/penyaluran kredit. Dalam hal ini penulis menganalisa bahwa prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Batu Artorejo secara keseluruhan dalam menjalankan tahap-tahap pemberian kredit sudah sesuai dengan teori yang ada. Namun dalam pelaksanaan dilapangan, terdapat kekurangan dalam penyelidikan mengenai informasi tentang calon debitur dengan tidak melakukan wawancara ulang setelah analisis kredit dilakukan. Apabila salah satu tahapan dalam proses pemberian kredit tidak dilakukan, maka akan menyebabkan kurangnya informasi tambahan yang diperoleh oleh pihak BPR sehingga BPR tidak mengetahui informasi mengenai calon debitur secara keseluruhan serta kurang menguasai usaha milik debitur. Informasi tersebut berkaitan dengan kecocokan antara data yang disampaikan oleh calon debitur mengenai data pribadi dan usahanya pada saat mengajukan permohonan kredit dengan kenyataan di lapangan baik berupa kondisi keuangan maupun kondisi usaha calon debitur sebelum mengajukan kredit pada BPR serta karakter atau sifat sebenarnya yang dimiliki oleh calon debitur.

4.2.1.2 Pengawasan Kredit

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting untuk memonitoring keadaan usaha debitur terutama debitur yang menunjukkan tanda-tanda akan terjadi masalah. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPR Batu Artorejo adalah dengan melakukan pengawasan pada setiap tahapan-tahapan proses pemberian kredit mulai dari permohonan kredit diajukan hingga pada tahap pelunasan kredit. Dalam hal ini, karyawan harus benar-benar menguasai bidang

pekerjaannya dan mampu menjelaskan secara jelas dan rinci kepada calon nasabah mengenai kredit di BPR tersebut agar tidak terjadi kesalahan.

Sedangkan pengawasan yang ada dalam PT. BPR Batu Artorejo yang dilakukan oleh komisaris yaitu Bapak Iwan Handojo dengan mengawasi, memastikan bahwa karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah diuraikan. Selain itu juga mengarahkan dan membina agar setiap tugas serta rencana berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ichwanul Ridwan selaku Direktur Umum PT. BPR Batu Artorejo, pada tanggal 8 Juni 2016:

“Untuk mendukung kemampuan serta meningkatkan kompetensi karyawan, maka PT. BPR Batu Artorejo memberikan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan pekerjaan karyawan. Melakukan evaluasi kinerja karyawan, Memberikan reward kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik berupa insentif/bonus.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa peran karyawan sangatlah penting. Maka untuk meningkatkan kemampuan karyawan, PT. BPR Batu Artorejo memberikan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan bidang pekerjaan karyawan yang biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam bekerja. Selain itu, PT. BPR Batu Artorejo melakukan evaluasi kinerja karyawan dan memberikan penghargaan berupa bonus kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik dan yang mampu mencapai target kredit yang ditentukan. Hal ini untuk memotivasi karyawan agar lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya PT. BPR Batu Artorejo melakukan pengawasannya dengan memantau usaha debitur setelah menerima kredit dan perkembangan usaha debitur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rika selaku Kabag. Kredit PT. BPR Batu Artorejo pada tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut:

"Pemantauan yang dilakukan oleh PT. BPR Batu Artorejo adalah dengan mengunjungi debitur setiap satu bulan sekali dalam kurun waktu 3 bulan setelah kredit dicairkan. Pada pemantauan berikutnya dilakukan pada saat debitur membayar cicilan kreditnya."

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pemantauan usaha debitur dilakukan setiap satu bulan sekali selama 3 bulan berturut-turut. Setelah itu pemantauan dilakukan ketika debitur membayar cicilan kreditnya. Selain itu PT. BPR Batu Artorejo juga melakukan wawancara kepada debitur pada saat debitur mengunjungi BPR untuk membayar cicilan kredit atau pada saat membayar pelunasan. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pemantauan yang dilakukan oleh PT. BPR Batu Artorejo masih kurang maksimal karena hanya dilakukan selama 3 bulan setelah kredit diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ichwanul Ridwan selaku Direktur Umum PT. BPR Batu Artorejo, pada tanggal 8 Juni 2016:

"PT. BPR Batu Artorejo menggunakan data SID (Sistem Informasi Debitur) yang dinaungi langsung oleh BI untuk mengetahui reputasi pinjaman calon debitur maupun debiturnya."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, PT. BPR Batu Artorejo juga melakukan pengawasan secara eksternal melalui data SID (Sistem Informasi Debitur) yang didapat dari Bank Indonesia (BI). Data yang diperoleh memungkinkan BPR untuk mengetahui apakah calon debitur atau debitur memiliki pinjaman kepada bank atau BPR yang lain. Jika calon debitur atau

debitur mempunyai tunggakan kredit pada bank/BPR lain, maka pihak BPR akan mengurangi jumlah pinjaman kredit agar tidak menimbulkan masalah yang dapat merugikan BPR.

Dalam islam, melakukan pengawasan harus secara menyeluruh seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat:6)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan sesuatu sebaiknya harus memeriksa secara teliti dan melakukan pengawasan yang baik. Hal ini dilakukan agar bank dapat mengetahui keadaan nasabah yang sebenarnya sehingga jika terjadi hal yang yang tidak diinginkan maka bank dapat membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat sehingga tidak sampai merugikan kedua belah pihak (kreditur dan debitur).

Menurut Suhardjono (2004:233) pengawasan kredit dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu pengawasan preventif (pengawasan pada setiap tahapan pemberian kredit), pengawasan melekat (pengawasan yang dilakukan dalam perusahaan oleh pimpinan perusahaan), dan pengawasan represif (pemantauan terhadap penggunaan kredit yang diberikan dan perkembangan usaha debitur). Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa dalam melakukan pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Batu Artorejo secara keseluruhan sudah sesuai dengan dengan teori yang ada. Namun, dalam melakukan pemantauan terhadap

penggunaan kredit yang diberikan kepada debitur dan perkembangan usaha debitur masih kurang efektif dan maksimal karena hanya dilakukan berturut-turut pada 3 bulan pertama sejak kredit diberikan. Jika pemantauan yang dilakukan oleh BPR kurang efektif dan maksimal, maka dapat menimbulkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana kredit yang diberikan oleh BPR dikelola oleh debitur dan bagaimana perkembangan usaha debitur secara rutin dan berkala serta kurangnya pemahaman tentang usaha debitur yang akan mengakibatkan terjadinya kredit macet.

4.2.2 Analisis Rasio Likuiditas dan Strategi Mempertahankan Likuiditas

PT.BPR Batu Artorejo

4.2.2.1 Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar. Apabila likuiditas suatu perusahaan menurun, maka kondisi perusahaan tersebut juga akan terganggu. Penilaian tingkat likuiditas suatu perusahaan dapat dilihat dari hasil perhitungan empat rasio sebagai berikut:

a. *Cash Ratio*

Cash Ratio digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. Berikut adalah hasil dari perhitungan *cash ratio*:

Tabel 4.3
Perhitungan *Cash Ratio*
PT. BPR Batu Artorejo

Tahun	Alat Likuid	Pinjaman yang Harus segera dibayar	<i>Cash Ratio</i>
2012	2.970.206	6.542.706	16,79%
2013	1.411.596	5.510.246	14,21%
2014	2.655.141	7.110.667	20,82%
2015	2.375.574	6.970.075	18,76%

Sumber: PT. BPR Batu Artorejo, data diolah.

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa tingkat *cash ratio* PT. BPR Batu Artorejo pada tahun 2012 adalah 16,79% kemudian pada tahun 2013 tingkat *cash ratio* menurun menjadi 14,21% , namun pada tahun 2014 tingkat *cash ratio* kembali meningkat sebesar 20,82% sedangkan pada tahun 2015 kembali turun menjadi 18,76%. Menurut Dendawijaya (2005:114) besarnya *cash ratio* adalah $\geq 5\%$. Meskipun pada tahun 2013 *cash ratio* sempat menurun, namun pada tahun berikutnya kembali meningkat. Jika dilihat dari nilai rasionya, untuk *cash ratio* dari tahun 2012 hingga 2014 dalam kondisi yang sehat. Dengan demikian, BPR mampu melunasi kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar dalam jangka pendek dengan alat-alat likuid yang dimiliki oleh BPR tersebut.

b. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tabungan yang sudah dijadikan produk kredit baru. Rasio ini juga seringkali digunakan untuk membandingkan dua atau lebih perusahaan keuangan dalam menilai kesehatannya. Berikut adalah hasil dari perhitungan *loan to deposit ratio*:

Tabel 4.4
Perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)
PT. BPR Batu Artorejo

Tahun	Kredit yang Diberikan	Total Dana Pihak Ketiga	LDR
2012	6.468.156	6.418.619	68,53%
2013	7.163.910	5.362.632	88,78%
2014	8.078.121	6.965.506	75,61%
2015	8.482.027	7.174.471	118%

Sumber: PT. BPR Batu Artorejo, data diolah.

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa tingkat *Loan To Deposit Ratio* PT. BPR Batu Artorejo sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dikatakan sehat adalah diantara 78% - 100%. Tingkat LDR PT. BPR Batu Artorejo pada tahun 2012 sebesar 68,53% , kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 88,78% dan pada tahun 2014 menurun menjadi 75,61%. Pada tahun 2013, kondisi LDR PT. BPR Batu Artorejo dalam kondisi yang sehat hal ini dikarenakan dalam penyaluran kreditnya dengan lebih berhati-hati. Namun pada tahun 2012, 2014 dan 2015, kondisi LDR PT. BPR Batu Artorejo dalam keadaan yang tidak sehat, karena nilai rasionya kurang dan melebihi dari batas ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Tingkat LDR yang rendah pada tahun 2012 ini disebabkan karena adanya peningkatan kredit bermasalah. Sedangkan rendahnya tingkat LDR pada tahun 2014 disebabkan karena penarikan dana pihak ketiga dan adanya kebijakan kredit. Kebijakan dari PT. BPR Batu Artorejo berkaitan dengan upaya LDR memenuhi ketentuan BI adalah dengan meningkatkan dana pihak ketiga yang disalurkan kepada debitur secara baik dan berkualitas. Kemudian mengambil kebijakan dengan memberikan insentif bagi karyawan yang memenuhi target dalam peningkatan dana pihak ketiga.

c. *Loan to Asset Ratio*

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh bank. Menurut Dendawijaya (2005:117) semakin tinggi rasio ini maka likuiditas semakin rendah. Berikut adalah hasil dari perhitungan *loan to asset ratio*:

Tabel 4.5
Perhitungan *Loan to Asset Ratio* (LAR)
PT. BPR Batu Artorejo

Tahun	Kredit yang diberikan	Total Aset	LAR
2012	6.468.156	9.924.619	65,17%
2013	7.163.910	9.015.702	79,46%
2014	8.078.121	11.489.720	70,31%
2015	8.482.027	12.064.206	70,30%

Sumber: PT. BPR Batu Artorejo, data diolah

Tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa tingkat *Loan to Asset Ratio* (LAR) PT. BPR Batu Artorejo pada tahun 2012 adalah 65,17% , kemudian pada tahun 2013 tingkat LAR meningkat sebesar 79,46% dan pada tahun 2014 tingkat LAR kembali turun sebesar 70,31% dan pada tahun 2015 tingkat LAR sebesar 70,30%. Menurut Dendawijaya (2005:116), semakin tinggi tingkat rasio LAR maka tingkat likuiditasnya akan semakin kecil karena jumlah aset yang digunakan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Pada tahun 2012 tingkat LAR menunjukkan bahwa dalam kemampuan BPR memenuhi permintaan kredit melalui sejumlah aset yang dimilikinya adalah dalam kondisi sehat. Namun, pada tahun 2013 dan 2014 tingkat LAR bisa dikatakan tinggi, hal ini akan menyebabkan terganggunya likuiditas BPR tersebut.

d. *Net Performing Loan (NPL)*

Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh BI, NPL digunakan untuk mengukur kualitas suatu krdit. Semakin kecil rasio ini maka tingkat likuiditas suatu bank dikatakan cukup baik. NPL yang baik adalah bernilai $\leq 5\%$. Berikut adalah hasil perhitungan NPL:

Tabel 4.6
Perhitungan *Net Performing Loan* (NPL)
PT. BPR Batu Artorejo

Tahun	Kredit Bermasalah	Kredit yang diberikan	NPL
2012	462.286	6.468.156	7,10%
2013	353.853	7.163.910	4,94%
2014	376.624	8.078.121	4,66%
2015	364.628	8.482.207	4,54%

Sumber : PT. BPR Batu Artorejo, data diolah

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa Tingkat *Net Performing Loan* (NPL) PT. BPR Batu Artorejo sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dikatakan dalam keadaan yang sehat apabila nilai rasionya $\leq 5\%$. Tingkat NPL PT. BPR Batu Artorejo pada tahun 2012 adala 7, 10% yang artinya PT. BPR Batu Artorejo dalam keadaan yang tidak sehat. Akan tetapi, pada tahun berikutnya tingkat NLP terus menurun yaitu pada tahun 2013 tingkat NPL sebesar 4,94% dan pada tahun 2014 tingkat NPL sebesar 4,66% yang artinya BPR dalam keadaan yang sehat. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh BPR. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ichwanul Ridwan pada tanggal 8 Juni 2016:

“Penyebab utama terjadinya kredit macet (NPL) adalah analisa kredit yang kurang tepat karena kurang menguasai usaha milik debitur.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat NPL yang tinggi pada tahun 2012 disebabkan karena kurang menguasai usaha milik debitur pada saat melakukan analisa kredit. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang dimiliki oleh karyawan mengenai usaha calon debitur maupun debiturnya. Selain itu tingkat NPL yang tinggi pada karena penyaluran kredit yang sangat tinggi pada tahun 2012 yaitu hampir mencapai 80% dari total aset yang dimiliki oleh PT. BPR Batu Artorejo.

4.2.2.2 Strategi Mempertahankan Likuiditas PT. BPR Batu Artorejo

Sangatlah penting bagi suatu bank untuk menjaga keadaan likuiditasnya agar selalu stabil dan dalam keadaan yang selalu baik. Apabila likuiditas suatu bank mengalami penurunan, maka akan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kinerja bank tersebut. Dalam prakteknya, banyak cara yang dilakukan oleh bank untuk mempertahankan atau menjaga keadaan likuiditas agar tetap dalam keadaan yang baik.

Dari hasil perhitungan cash ratio dari tahun 2012 sampai 2015 berturut-turut adalah 16,79%, 14,21%, 20,82% 18,76%. Meskipun tingkat cash ratio dari tahun 2012 sampai 2015 mengalami na-turun namun masih dalam kondisi yang sehat. Cash ratio yang fluktuatif disebabkan karena adanya kesenjangan arus kas, yaitu arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk. Cash ratio yang rendah dapat mengganggu kondisi likuiditas bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ichwanul Ridwan selaku Direktur Umum PT. BPR Batu Artorejo pada tanggal 8 juni 2016 sebagai berikut:

“Strategi yang dilakukan oleh PT. BPR Batu Artorejo dalam mempertahankan atau menjaga keadaan likuiditasnya adalah dengan menjaga rasio kas harus 5% atau diatas 5% dan aktif mengukur posisi likuiditas BPR terhadap kewajiban segera yang harus dibayar dan pemenuhan kewajiban dana pihak ketiga. ”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam mempertahankan likuiditasnya PT. BPR Batu Artorejo mengupayakan untuk

menjaga rasio kasnya harus 5% atau diatas 5%. Berdasarkan PBI No. 7/34/PBI/2005 tentang tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus, likuiditas rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 3% maka dinyatakan dalam pengawasan khusus. Apabila tidak ada perbaikan selama 6 bulan, maka risikonya adalah BPR tersebut akan ditutup. Selain itu, PT. BPR Batu Artorejo juga mengukur posisi likuiditas BPTR terhadap kewajiban segera yang harus dibayar dan pemenuhan kewajiban dana pihak ketiga. Hal ini dilakukan BPR untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu kewajiban jangka pendek tersebut harus dilunasi. Untuk menjaga rasio kasnya tetap 5% atau di atas 5% maka yang perlu dilakukan oleh BPR adalah bank harus memperhatikan sumber dana inti yang sesuai dengan sifat bank yang bersangkutan maupun dan sumber dana yang ada di masyarakat; bank harus mengelola sumber-sumber dana maupun penempatan dananya secara berhati-hati dengan memperhatikan komposisi sumber dana jatuh tempo berdasarkan jumlah masing-masing komposisi, tingkat suku bunga, produk-produk yang dimiliki dan sebagainya.

Jika dilihat dari hasil perhitungan LDR dari tahun 2012 sampai 2015 berturut-turut adalah 68,53%, 88,78%, 75,61%, 118%. Rendahnya tingkat LDR disebabkan karena penyaluran kredit yang dilakukan dengan kurang hati-hati. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kredit yang disalurkan pada tahun 2012 yang cukup tinggi dari total aset yang dimiliki oleh BPR, hal tersebut dapat menyebabkan tingkat laba yang diperoleh oleh BPR akan terganggu dan dapat memunculkan indikasi terjadinya kredit macet. Maka yang dilakukan oleh BPR untuk memenuhi standar yang telah ditentukan oleh BI adalah dengan melakukan kerjasama dan

melakukan pinjaman antar bank selama tiga bulan. Jika dilihat dari rasio LAR dari tahun 2012 sampai 2015 berturut-turut adalah 65,17%, 79,46%, 70,31% dan 70,30%. Tingkat LAR PT. BPR Batu Artorejo pada tahun 2013 dan 2014 tingkat LAR cukup tinggi. Apabila rasio ini semakin tinggi maka tingkat likuiditas bank akan semakin rendah. Dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BI, maka PT. BPR Batu Artorejo adalah dengan meningkatkan penyaluran kredit secara selektif dengan memilih calon debitur yang memang layak mendapatkan kredit dari BPR.

Dari hasil perhitungan NPL, pada tahun 2012 tingkat NPL sangat tinggi melebihi dari batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu akibat usaha debitur yang mengalami kerugian sehingga tidak mampu melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo. Adanya tunggakan angsuran kredit karena debitur sengaja tidak ingin membayar angsuran. Selain itu penyaluran kredit yang sangat besar yang mencapai hampir 80% dari jumlah aset yang dimiliki oleh BPR. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2012 ketika jumlah kredit yang disalurkan sangat besar sehingga tingkat NPL juga sangat tinggi yaitu 7,10% yang artinya BPR dalam kondisi yang tidak sehat. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka yang dilakukan oleh BPR adalah menyelesaikan tunggakan kredit dengan mengingatkan dan melakukan penagihan secara ekstensif baik mengenai angsuran pokok, bunga dan waktu pembayaran sampai jatuh tempo untuk menambah jumlah rasio kas, memberikan perpanjangan pembayaran kredit yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar kembali kreditnya dengan perpanjangan waktu yang diberikan oleh

BPR. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nafi' selaku debitur di PT. BPR Batu Artorejo pada tanggal 22 November 2016 sebagai berikut:

“Pada saat beliau mengalami gagal panen yang mengakibatkan beliau tidak bisa melakukan pelunasan kredit tepat pada saat waktu jatuh tempo, maka yang dilakukan oleh PT. BPR Batu Artorejo adalah dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran kredit.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa ketika debitur mengalami kegagalan dalam usahanya yang mengakibatkan kredit macet yang dapat menyebabkan kondisi likuiditas BPR terganggu, maka yang dilakukan oleh PT. BPR Batu Artorejo untuk menyelesaikan kredit macetnya dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran kredit kepada debitur yang mengalami gagal usaha. Hal ini dilakukan dengan maksud agar debitur dapat melunasi kreditnya dengan kebijakan yang dibuat oleh BPR. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh islam sebagaimana firman Allah dalam surat A-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ دُونُ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)

“Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian dari semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang berada dalam situasi yang sulit dalam membayar hutangnya maka berilah tangguhan sampai orang yang berhutang tersebut lapang. Apabila segala upaya untuk menyelesaikan kredit macet sudah dilakukan namun debitur masih tidak mampu untuk melunasi pinjaman kreditnya, maka jalan terakhir yang ditempuh oleh BPR adalah dengan melakukan penarikan jaminan yang disertakan oleh debitur yang selanjutnya akan

dilelang untuk menutupi pinjaman debitur. Namun, pada tahun 2012 sampai 2015 PT. BPR Batu Artorejo tidak sampai melakukan penarikan jaminan yang disertakan oleh debitur.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai pemenuhan likuiditas bank seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam memberikan hutang piutang hukumnya adalah sunnah. Namun akan menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jika dikaitkan dengan likuiditas, maka BPR wajib memenuhi kewajiban jangka pendeknya ketika sewaktu-waktu kewajiban segeranya ditarik oleh debitur dengan aset yang dimiliki oleh BPR karena kewajiban segera yang harus dibayar oleh BPR di dalamnya terdapat hak orang lain yang harus diberikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang “Prosedur dan Pengawasan Pemberian Kredit Untuk Mempertahankan Likuiditas Perusahaan Pada PT. BPR Batu Artorejo Tahun 2012-2015”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan prosedur dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Batu Artorejo sudah sesuai dengan teori yang ada dengan menetapkan beberapa tahapan dalam pengajuan kredit dan sesuai dengan prinsip 5C. Namun peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan dalam tahap pengumpulan informasi mengenai usaha calon debitur dengan tidak wawancara ulang setelah analisis kredit dilakukan dan pemantauan yang dilakukan kurang efektif dan maksimal karena hanya dilakukan selama 3 bulan setelah kredit diberikan.
2. Strategi yang digunakan oleh PT. BPR Batu Artorejo untuk mempertahankan likuiditasnya adalah sebagai berikut:
 - e. Menjaga rasio kas harus 5% atau diatas 5%. Dengan memperhatikan sumber dana inti yang sesuai dengan sifat bank, mengelola sumber dana serta menyalurkannya secara berhati-hati dengan memperhatikan komposisi sumber dana jatuh tempo serta tingkat suku bunga dan produk-produk yang dimiliki oleh BPR.

- f. Aktif mengukur posisi likuiditas BPR terhadap kewajiban segera yang harus dibayar dan pemenuhan kewajiban dana pihak ketiga.
- g. Menyelesaikan Kredit bermasalah dan melakukan penagihan kredit secara ekstensif kepada para debitur.
- h. Memberikan perpanjangan waktu pembayaran kredit bagi debitur yang mengalami kegagalan usaha
- i. Mengambil alih jaminan untuk dilelang.
- j. Melakukan pinjaman antar bank dengan jangka waktu 3 bulan.

5.2 Saran

1. Dalam proses pengumpulan informasi tentang calon debitur, sebaiknya dilakukan dengan lebih teliti dan harus benar-benar menguasai tentang usaha milik debitur. Pemantauan penggunaan kredit dan perkembangan usaha debitur dilakukan secara rutin mulai dari kredit dicairkan hingga tahap pelunasan kredit. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi resiko yang akan terjadi terutama untuk debitur yang memperlihatkan tanda- tanda akan terjadinya kredit macet sehingga BPR dapat mengantisipasi hal tersebut.
2. Untuk ke depannya, dalam melakukan prosedur dan pengawasan pemberian kredit untuk mempertahankan likuiditas PT. BPR Batu Artorejo perlu memperhatikan dana kredit yang akan dipinjamkan, apakah sesuai dengan kemampuan usaha dari calon debitur serta dalam penyaluran kredit sebaiknya dilakukan dengan lebih berhati-hati lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qarni, 'Aidh. (2008). *Tafsir Muyassar*; Penerjemah: Tim Qisthi Press. Qisthi Press, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____. (2006). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____. (2007). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chairuddin. (2002). *Analisis Posisi Likuiditas*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua Cetakan Pertama*. PT. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. CV. Aisyah, Surabaya.
- Fatich, Cicik Rohmani. (2012). Pengaruh Prosedur, Pencairan dan Pengawasan Pemberian Kredit Terhadap Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Ka. Unit Sawojajar Malang, *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Hasibuan, Malayu. (2001). *Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Pertama*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Kasmir. (2000). *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Prenada Media, Jakarta.

- Margaretha, farah. 2007. *Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Martiana, L. Vina Maya. (2013). Tinjauan Atas Analisis Prosedur Prosedur Pemberian Kredit Serta Pencatatan Akuntansi Kredit Pensiun Pada PT. Bank Jabar Banten KCP. IPDN Jatinangor Kab. Sumedang, *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung.
- PBI No. 7/34/PBI/2005 Tentang BPR Dalam Pengawasan Khusus.
- Riyadi, Slamet. (2006). *Banking Assets And Liability Management, Edisi Ketiga*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Siagian, Luthviya Savitri. (2015). Sistem Pengendalian Kredit Untuk Mempertahankan Likuiditas Pada PT. Bank Sumut KCP GUBSU, *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Simorangkir, O.P. (2002). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. PT. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suhardjono. (2004). *Manajemen Perkreditan, Usaha Kecil dan Menengah*. UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 pasal 10.
- Taswan. (2006). *Manajemen Perbankan, Konsep Teknik dan Aplikasi + Banking Risk Assesment*. UPP STIM YKPN Yogyakarta, Yogyakarta.
- UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Uwais An-Nadwy, Syaikh Muhammad. (2004). *Tafsir Ibnu Qayyim, Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*. Darul Falah, Jakarta.
- Widyaningrum, Septian Fika. (2010). Analisis Efektivitas Pengelolaan Kredit Dalam Upaya Peningkatan Likuiditas Pada PT. BPR Grogol Joyo, *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Wirartha, I Made. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. CV. Andi Offset (Penerbit Andi), Yogyakarta.

<http://www.bprkita.blogspot.co.id/>, diakses 15 April 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja produk yang ada pada PT. BPR Batu Artorejo?
2. Bagaimana prosedur pemberian kredit mulai dari permohonan kredit sampai dengan pelunasan kredit pada PT. BPR Batu Artorejo ?
3. Apa saja syarat untuk mengajukan permohonan kredit di PT. BPR Batu Artorejo ?
4. Apakah PT. BPR Batu Artorejo menerapkan prinsip pemberian kredit 5C dan 7P ?
5. Bagaimana pola pengawasan kredit yang ada di PT. BPR Batu Artorejo ?
6. Apa yang dilakukan pengawas jika terjadi penyimpangan kredit ?
7. Bagaimana keadaan likuiditas serta strategi yang diterapkan untuk mempertahankan likuiditas pada PT. BPR Batu Artorejo ?

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Hikmah

NIM/Jurusan : 12510039/Manajemen

Pembimbing : Fitriyah, S.Sos.,MM

JudulSkripsi : Prosedur dan Pengawasan Pemberian Kredit Untuk
Mempertahankan Likuiditas Perusahaan Pada PT. BPR
Batu Artorejo Tahun 2012-2015

No	Tanggal	Materi Konsultasi	TandaTangan Pembimbing
1	17 Maret2016	Penentuan Judul	1
2	2 Mei 2016	Latar Belakang	2
3	4 Mei 2016	Bab I, Bab II, Bab III	3
4	8 Mei 2016	Proposal	4
5	7 November 2016	Acc Proposal	5
6	24 November 2016	Revisi Sempro	6
7	29 November2016	Acc Sempro	7
8	22 Desember 2016	Revisi Bab I-V	8
9	27 Desember 2016	Revisi Skripsi	9
10	28 Desember 2016	Acc Keseluruhan	10

Malang, 28 Desember2016

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Drs. H. MisbahulMunir, Lc.,M.Ei
NIP. 197507072005011005

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Nur Hikmah
 Tempat, tanggal lahir : Palu, 30 Maret 1994
 Alamat Asal : Jl. Sidoagung No. 185 RT/RW 001/001 Kel. Candirenggo,
 Kec. Singosari, Kab. Malang – Jawa Timur - Kode Pos:
 65153
 Telepon HP : 081230887562 / 089677089141
 E-mail : Nhikmah182@gmail.com

Pendidikan Formal

1999-2000 : TK Dharma Wanita SMT Pertanian
 2005-2006 : SDI 01 Al-Maarif Singosari
 2006-2009 : MTsN Lawang
 2009-2012 : MA Al-Maarif Singosari Malang
 2012-2016 : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri
 Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non Formal (Seminar, Kursus, dan Pelatihan)

1. Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang tahun 2012-2013
2. Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris UIN Malang tahun 2013-2014.
3. Pelatihan Pasar Modal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014.
4. Praktik Kerja Lapangan Integratif (PKLI) di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja, Magetan tahun 2015.
5. Pelatihan SPSS Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015.
6. Pelatihan penulisan karya ilmiah integratif Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016.
7. Seminar Nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013.

8. Seminar Nasional Entrepreneur Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015.
9. Sharia Economist Training (SET) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013.

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Pramuka MTsN Lawang tahun 2006-2007.
2. Ketua Pramuka MA Almaarif Singosari tahun 2010-2011.
3. Anggota Jurnalistik MA Almaarif Singosari tahun 2009-2012.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.